

**APLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH GERIK  
PERAK TENTANG PEMBERIAN NAFKAH 'IDDAH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**



**OLEH :**

**MUHAMMAD YASIR BIN ABDULLAH  
NIM : 10821004768**

**PROGRAM S1  
JURUSAN *AHWÂL AL-SYAKHSHIYYAH***

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU 2011 M/1432 H**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Aplikasi Putusan mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak tentang Pemberian Nafkah ‘Iddah dalam Perspektif Hukum Islam**”. Penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) tempat di mana penulis menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

Dalam Skripsi ini, penulis memaparkan tentang bentuk aplikasi putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak tentang pemberian Nafkah ‘Iddah dan Sanksi terhadap yang tidak menunaikan kewajiban: selanjutnya dilakukan analisis hukum Islam terhadap fakta permasalahan tersebut. Di samping itu, permasalahan ini dibahas karena dari Salinan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak tentang Nafkah ‘iddah istri, Hakim memutuskan besarnya hak ‘iddah yang wajib dibayar suami bersifat fluktuatif, meskipun kasus yang diadili sama. Di samping, peneliti ingin melihat apakah aplikasi putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak tentang pemberian nafkah ‘iddah menemukan kendala-kendala dalam hal pelaksanaan dan sanksi terhadap suami yang tidak menunaikan kewajibannya. Oleh karenanya kami tertarik dan mengangkat permasalahan ini ke dalam bentuk karya ilmiah, guna melihat fakta permasalahan Nafkah ‘Iddah ini.

Penelitian ini peneliti melakukan dengan menggunakan metode *Random Sampling*, peneliti mengambil 20 % (30 perkara) daripada 147 perkara di Mahkamah Syariah Gerik Perak sebagai jumlah sample dari populasi yang ada. Dari 30 orang jumlah sample tersebut terdiri atas suami istri yang bercerai pada tahun 2009. Hal ini merupakan sumber data yang bersifat primer. Adapun yang merupakan data dalam sekunder dalam penelitian ini adalah aparat setempat dan literature pustaka. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Angket, yang berisi item pertanyaan dan jawaban terhadap istri mengenai Aplikasi putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak dan sanksi bagi yang tidak menunaikannya. Peneliti melakukan wawancara pihak yang bersangkutan antaranya suami dan istri serta pihak-pihak lain sebagai informasi antaranya Hakim, Penolong Pendaftar, Pembantu Takbir. Peneliti menggunakan juga dokumentasi yaitu peneliti mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang terkait dengan pemberian nafkah ‘iddah di Mahkamah Rendah Syariah. Studi kepustakaan, peneliti menelaah buku-buku yang ada terkaitnya dengan persoalan yang di teliti.

Setelah dilakukan analisis dengan hukum Islam, maka peneliti menyimpulkan aplikasi putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak tentang pemberian nafkah ‘iddah suami terhadap istri sesuai hukum syara’ tetapi belum berjalan dengan semestinya dan tepat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan dan pembayaran nafkah ‘iddah mantan suami terhadap istri tersebut.

## **DAFTAR ISI**

### **LEMBARAN PENGESAHAN**

### **PERSEMBAHAN**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>Viii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan masalah .....	7
C. Perumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II : GAMBARAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH PERAK**

A. Latar Belakang, Sejarah Mahkamah Rendah Syariah .....	16
B. Misi, Visi, Objektif jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak .....	20
C. Pelaksanaan Pengadilan di Mahkamah Syariah .....	22
D. Kompetensi Absolut Mahkamah Syariah .....	24

### **BAB III : TINJAUAN UMUM TEORI NAFKAH ‘IDDAH**

A. Pengertian Nafkah ‘Iddah.....	31
B. Dasar Hukum .....	33
C. Macam-Macam ‘Iddah .....	37
D. Syarat-Syarat Istri Mendapat Nafkah ‘Iddah.....	41
E. Ukuran Nafkah ‘Iddah .....	41

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

A. Aplikasi Pemberian Nafkah ‘Iddah Istri Di Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak.....	46
B. Sanksi Bagi Yang Tidak Menunaikan Kewajiban Nafkah ‘Iddah .....	60
C. Analisis Hukum Islam .....	65

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu sunnah yang mana suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan melalui akad perkawinan. Bahkan ia bukan sekadar perjanjian yang bersifat keperdataan tetapi suatu perjanjian suci atau akad yang sangat kuat, disebut sebagai *mitsaaqon gholiidhan* (ميثاقا غليظا) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama secara sah untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*<sup>14</sup>. Maka, apabila putus perkawinan atau terjadinya perceraian, akan ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.

Akibat hukum perkawinan yang putus tersebut bukan saja karena perceraian, namun karena kematian salah satu pihak juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Dalam pasal 38 Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian, (c) atas keputusan pengadilan<sup>15</sup>. Dari akibat hukum putus perkawinan,

---

<sup>14</sup> Mohammad Ali Al-Sabouni, *Az-Azwaaj Al-Islaami Al-Mukkir: Sa'aadatun wa Hashaanatun*, Penerjemah Hamdan Rasyid, *Pernikahan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Dar Al-Kutub al-Islamiyah, Cetakan I, 2004), hlm 33-34.

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-4, 2000), hlm. 282.

ada hak dan kewajiban timbal balik antara bekas suami dan bekas istri selepas demikian. Memberikan nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, termasuklah menyediakan segala kebutuhan asasi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya itu kaya. Kewajiban ini ditetapkan oleh Quran, sunnah dan ijma' ulama<sup>16</sup>.

Ijma' menetapkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri-istri mereka apabila suami telah baligh dan istrinya tidak nusyuz, karena perempuan yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya<sup>17</sup>. Penetapan kewajiban pemberian nafkah ini turut berlaku sebagaimana menurut seksyen (Pasal) 60 Enakmen<sup>18</sup> Keluarga Islam Perak Tahun 1984 (pindaan<sup>19</sup> 2004), yaitu kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi istri, dan kesan *nusyuz*<sup>20</sup>. Jadi menurut ketetapan ijma' dan ketentuan seksyen (Pasal) 60 Enakmen Keluarga Islam

---

<sup>16</sup> Mustofa al-Khin, dkk, *Fiqh Al-Manhaji*, Penerjemah Azizi Ismail dan Mohd Asri Hashim, *Kitab Fikah Mazhab Syafie: Menghuraikan Bab Undang-undang Kekeluargaan*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2002), hlm.622.

<sup>17</sup> Abdul Aziz, *Kursus Bimbingan Perkawinan Serta 20 Soal Jawab Temuduga Jabatan Agama Islam*, hlm.105.

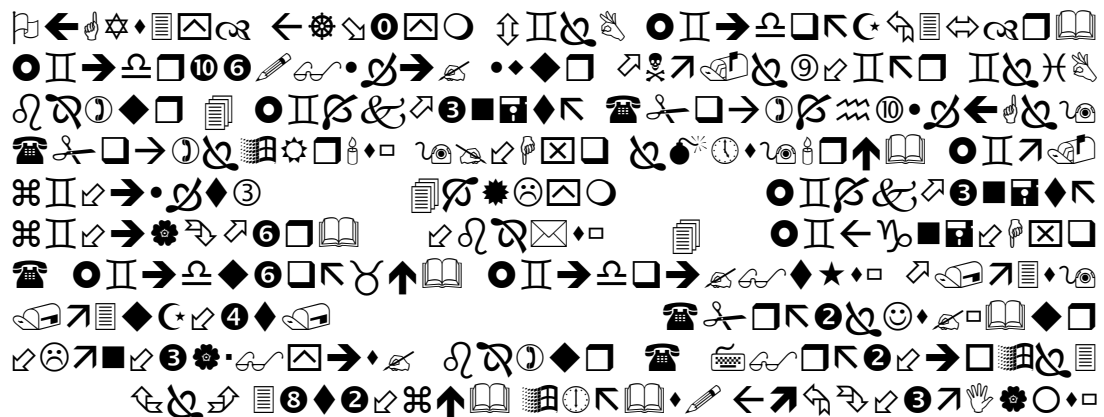
<sup>18</sup> Enakmen adalah suatu undang-undang yang digubal (dibentuk) oleh Dewan Undangan (majlis yang mengubal undang-undang) Negeri masing-masing Negara Bagian di Malaysia dan berlaku mengikat bagi Negara Bagian tersebut selama mana tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Istilah "*Ordinan*" digunakan di Negara Bagian Sarawak untuk maksud yang sama.

<sup>19</sup> Pindaan = amandemen

<sup>20</sup> Perak, *Enakmen Keluarga Islam*, (Perak, 2004), halaman 441-442.

Peruntukan seksyen 60 menyebutkan sebagai berikut:

1. Tertakluk kepada Hukum Syarak, Mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada istri atau bekas isterinya.
2. Tertakluk kepada Hukum Syarak dan pengesahan Mahkamah, seseorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia *nusyuz* atau enggan dengan tidak berpautan menurut kemahuan atau perintah sah dari suaminya:
  - (a) apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya
  - (b) apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya; atau
  - (c) apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke suatu rumah atau tempat lain,
3. Selepas sahaja isteri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah suaminya, maka isteri itu tidak lagi menjadi *nusyuz*.



Artinya: “Tempatkan lah (para istri) dimana kamu bertempat menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka; dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, tetapi jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”<sup>21</sup>. (TQS. Ath-Thalq[65] : 6)

Undang-Undang Keluarga Islam yang terpakai di negeri-negeri di Malaysia pada masa ini adalah lebih lengkap dan menyeluruh dan berasas kepada Al-Quran dan sunnah. Jika hendak dibandingkan dengan undang-undang Keluarga Islam di

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quranul Karim*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), hal 558

beberapa buah negara Islam lain, tidaklah jauh perbedaannya. Orang-orang Islam hendaklah yakin bahwa undang-undang Islam adalah undang-undang yang terbaik dan sesuai untuk setiap umat manusia di setiap kondisi, zaman dan tempat karena undang-undang Islam bersumber daripada wahyu Allah SWT, dan sudah pasti sang penciptalah yang lebih mengetahui kebutuhan seluruh hambaNya dan apa yang terbaik untuk diri mereka. Demi menegakkan keadilan seharusnya umat Islam perlu kepada undang-undang dan tidak diragukan sama sekali bahwa umat Islam telah dikaruniakan dengan undang-undang Islam yang syumul dan universal. Untuk melaksanakannya, maka diwujudkan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan sengketa umat Islam dalam urusan berkaitan hal ihwal Islam, Di Malaysia dibangunkan pengadilan yang dikenal sebagai Mahkamah Syariah.

Di Negara bagian Perak terdapatnya Peradilan Agama dalam memutuskan keputusan peradilan, yaitu Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak dan hukumnya meliputi wilayah daerah-daerahnya, yang dipandu berdasarkan Enakmen Keluarga Islam Perak tahun 1984 (pindaan 2004). Pada tahun 2009 Mahkamah Rendah Syariah Perak menerima sebanyak 316 perkara dan yang dapat di putuskan Mahkamah sebanyak 273 perkara. Dalam 273 perkara yang dapat di putuskan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak terdapatnya 207 perkara berkenaan dengan masalah berkaitan perceraian atau pembubaran perkawinan dan 147 perkara cerai gugat yang telah diputus oleh hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik, menurut keterangan Pembantu Takbir (Kesetiausahaan) yaitu Panitera Hukum



Mahkamah Rendah Syariah Gerik bahwa terdapat 20% ( 30 perkara ) dari kasus perceraian yang di aplikasi putusan bermasalah, adanya suami yang tidak mahu membayar nafkah iddah kepada istri sesuai perintah yang terdapat dengan putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik<sup>22</sup>.

Seperti kasus yang terdapat di Mahkamah Rendah Syariah Gerik, sebagaimana yang telah dinyatakan pada seksyen 60 Enakmen Kelurga Islam Perak di jelaskan bahwa selama masa iddah suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada istri yang diceraikannya. Namun terdapatnya kasus di Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak yang mana ada suami yang tidak membayarkan nafkah iddah kepada istri, dan dalam merealisasikan ini, maka penulis temukan kasus ini sebagai berikut:

Menurut wawancara penulis dengan Pembantu Takbir (Panitera) En. H. Nazri bin Kamal, yang bertugas mahkamah tersebut, adanya putusan yang telah di putuskan oleh pihak mahkamah, setelah jatuhnya talak (putusnya perkawinan) di Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak. Pihak Mahkamah Syariah bisa memberikan sanksi yang ingkar dalam pembayaran nafkah iddah dengan mengeluarkan Sepina (surat hadir Mahkamah) ataupun Sepina dan Waran, jika hal demikian berlaku dan menyalahi putusan hakim serta Enakmen Keluarga Islam Perak. Antara kasus-kasus yang terdapat di Mahkamah Rendah Syariah yaitu kasus

---

<sup>22</sup> En. H. Nazri Bin Kamal, *wawancara* , Mahkamah Rendah Syariah Perak tanggal 20 Mac 2010.

(KES MAL NO 02100-028-0171 THN 2009) Puan Fatimah (Plaintif<sup>23</sup>) lawan Mohd Khalid (Defenden<sup>24</sup>) mengenai nafkah iddah suami terhadap isteri. Tetapi defenden (mantan suami) tidak mau memberi nafkah 'iddah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak Mahkamah dengan alasan dia kurang mampu untuk membayar nafkah iddah tersebut, padahal hakim telah memberikan putusan dalam perkara ini, yaitu sebagaimana terdapatnya dalam kasus, yaitu yang mana defenden wajib membayar nafkah iddah kepada plaintiff yang diceraikan sebagaimana yang tertera di putusan mahkamah sebanyak RM 1500 (Rp. 3.750.000). Akan tetapi defenden tidak melaksanakannya, dan ini telah melanggar putusan yang telah ditetapkan oleh hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak. Selain itu terdapat ada juga kasus yang lain tetapi masih dalam pembahasan yang sama yaitu terdapat pada putusan (KES MAL NO 02100-028-053 THN 2009) disebut bahwa suami wajib membayar nafkah iddah sebesar RM 2000 (Rp. 5.000.000) tetapi defenden mengingkari dengan alasan yang sama diatas.

Pada Putusan Hakim : (KES MAL NO 02100-028-0284 THN 2009) yaitu hakim Mahkamah telah membacakan putusan dan pada saat itu telah berlaku pembayaran nafkah iddah sebesar RM 2 500 (Rp. 6.250.000), bagi suami terhadap istri yang diceraikannya. Setelah 1 (satu) bulan dari putusan, istri menemui mantan suami dengan menuntut nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Gerik, tetapi suami menyatakan ia akan memberikan minggu depannya,

---

<sup>23</sup> Plantif adalah pengugat

<sup>24</sup> Defenden adalah tergugat

namun istri hanya menerima janji sahaja oleh suami yang tidak merealisasikan implementasi pemberian nafkah iddah sehingga waktu iddah istri habis. Selain daripada itu terdapat juga kasus yang lain bersamaan daripada faktor ingkarnya suami dalam putusan mahkamah yaitu kasus (KES MAL NO 02100-028-0247 THN 2009) Sopiah binti Abd. Rahman (Plaintif) lawan Zainal bin Ibrahim (Defenden) adalah berikut, : Plaintif seperti nama di atas yang tinggal di Kelantan Malaysia dan defenden yang tinggal Trolak Perak Malaysia. Defenden melafazkan (menjatuhkan) talaq satu di hadapan Hakim Mahkamah Rendah dan di hadapan Pendaftar. Mahkamah memutuskan istri di talaq dengan talaq 1 tanpa paksaan dan bermulalah iddah si istri. Mahkamah menetapkan nafkah iddah yang di bayar oleh defenden RM1.000.00 (Rp 2.500.000) pada setiap bulan selama tiga bulan sebanyak RM 3.000.00 (Rp 7.500.000), namun hal ini tidak dihiraukan oleh suami, yaitu dengan tidak dibayarnya nafkah iddah dan ini telah melanggar putusan yang telah ditetapkan oleh hakim Mahkamah Rendah Syariah Perak dan hukum Islam.

Hal ini yang melatar belakangi penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam permasalahan-permasalahan tersebut dengan meletakkan judul: ”**Aplikasi Putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak tentang Pemberian Nafkah ‘Iddah dalam Perspektif Hukum Islam**”.

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini menjadi lebih terfokus, tersusun dengan sistematis dan terarah, maka penulis membatasi lingkup permasalahannya kepada

aplikasi putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak Malaysia bagi suami dan sanksi bagi tidak membayar nafkah 'iddah menurut Hukum Islam. Penulis hanya meneliti perkara yang sudah di putuskan Hakim (*Yurisprudensi*) dari Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak pada tahun 2009.

### **C. Permasalahan**

Dengan mengingat pembatasan masalah seperti yang dinyatakan sebelum ini, maka perumusan masalah disusun dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak tentang pemberian nafkah 'iddah oleh suami kepada istri?
2. Bagaimana sanksi bagi suami yang tidak menunaikan kewajibannya dalam membayar nafkah iddah?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap permasalahan tersebut?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk deskripsikan aplikasi putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak tentang pemberian nafkah 'iddah suami terhadap istri.
2. Mengetahui upaya ketentuan Mahkamah Rendah Syariah Perak ketentuan sanksi bagi yang ingkar membayar nafkah iddah.

3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap permasalahan nafkah iddah.

Seterusnya, manfaat yang dapat dikutip dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui dan lebih memahami problematika seputar pemberian nafkah iddah yang menjadikan tanggungjawab suami terhadap isteri dan aplikasinya di Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak.
2. Dapat memperluaskan wawasan intelektual kepada umat Islam, para pelaku akademik di bidang hukum, terutama tentang kasus tinjauan terhadap pemberian nafkah iddah dan undang-undang negeri bagaian Perak, Gerik khususnya.
3. Untuk merealisasikan salah satu Tri Darma Penguruan Tinggi yaitu Keilmuan dan Penelitian.
4. Dapat menambah wawasan ilmu dalam wilayah kajian dan sumbanagan penulis terhadap pengetahuan umumnya yang erat kaitannya dengan program studi *Ahwal al-Syakhshiyyah* dan menambah literature kepustakaan.

## **E. Metode Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field resech). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagaai berikut :

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research), dengan mengambil lokasi kawasan di Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak, untuk menyelesaikan dan menetapkan putusan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak berpekara yang beragama Islam.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek dalam penelitian adalah istri atau suami yang bercerai.
- b.Objek dalam penelitian adalah aplikasian putusan tentang pemberian nafkah ‘iddah di daerah kawasan wewenang Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak serta sanksi bagi yang tidak menunaikannya.

### **3. Populasi dan sampel**

Populasi yang terdapat di dalam penelitian ini adalah istri atau suami yang bercerai pada tahun 2009 dan tidak mendapatkan hak dan tidak menunaikan kewajiban sebagaimana yang semestinya, jumlah populasi 147 perkara/kasus cerai gugat dalam mendapatkan hak dan menunaikan kewajiban sebagaimana yang sepatutnya. Karena populasi sebanyak 147 kasus maka penulis mengambil

sample dalam penelitian ini 20% yaitu 30 kasus, sample ini akan ditarik dengan menggunakan *metode Random Sampling*.

#### 4. Sumber Data

Dalam Penelitian ini data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder.

- a) Data Primer: yaitu data yang diperoleh dari responden yaitu 30 istri atau suami yang telah bercerai di kawasan kewenangan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak.
- b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literature-literature yang tersedia, instansi-instansi terkait, Hakim di Mahkamah Rendah Syariah Perak, kitab-kitab fikih serta Buku-buku yang lain memungkinkan berhubungan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpul data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Angket yang berisikan atas beberapa item pertanyaan.
- b. Wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti. Pertanyaan ditujukan

kepada Suami Istri, Hakim, Pendaftar, Penolong Pendaftar, dari pertanyaan berkaitan tentang nafkah iddah<sup>25</sup>.

- c. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan pemberian nafkah 'iddah di Mahkamah Rendah Syariah Gerik.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam analisis, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang terkumpul dan diolah berdasarkan proses pengamatan yang mendalam dan di analisa berdasarkan bahan hukum primer dan hukum Islam. Penulis menerapkan Metode analisa ini, dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti<sup>26</sup>.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data yang dikumpulkan dianalisa, maka penulis mendiskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaedah-kaedah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan secara khusus.

---

<sup>25</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Rawamangun, Jakarta Timur : Prenada Media, Cetakan I, Juli 2003), halaman 384 dan 385.

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan XIII, Agustus 2006), halaman 15.



2. Metode Induktif, yaitu dengan menggambarkan data-data yang khusus, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode Deskriptif Analitis , yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa, sehingga, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### **F.Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan seperti berikut:

**BAB I:** Pada permulaan bab ini penulis mengetengahkan gambaran pendahuluan yang memuatkan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Penulis membahaskan Gambaran umum latar belakang Mahkamah Syariah Gerik Perak yang berisi tentang sejarah, lokasi, dan kedudukan dan Misi, Visi, objektif jabatan kehakiman syariah Negeri Perak, Pelaksanaan Pengadilan di Mahkamah, Kompetensi Absolut Mahkamah Syariah dan struktur organisasi.

**BAB III:** Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang teori nafkah iddah dalam hukum islam, yaitu pengertian dan dasar hukum nafkah

iddah, sebab-sebab mendapatkan iddah, macam-macam 'iddah, ukuran nafkah iddah dari pendapat para ulama' tentang pembayaran nafkah.

BAB IV: Pada bab ini pembahasan tentang aplikasi pembayaran nafkah iddah bekas istri, yaitu: Aplikasi pemberian nafkah iddah bekas suami terhadap bekas istri di Mahkamah Syariah Gerik Perak, sanksi bagi yang tidak menunaikan kewajiban pembayaran nafkah iddah dan tinjauan Hukum Islam mengenai aplikasi pemberian nafkah iddah bagi istri.

BAB V: Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, serta beberapa saran-saran berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini yang di harapkan dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan penulis pada pihak-pihak terkait.

## **BAB II**

### **GAMBARAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH PERAK**

#### **A. Latar Belakang, Sejarah Mahkamah Rendah Syariah**

Pada tahun 1948, ordinan Mahkamah Persekutuan dan sistem kehakiman persekutuan memisahkan Mahkamah Syariah dari hirarki Mahkamah. Pada masa pemerintahan kuasa asing, segala urusan agama diberi kuasa kepada raja-raja Melayu tetapi terhadap bidang yang terbatas seperti perkawinan, adat istiadat, dan agama. Pada tahun 1952, negeri Selangor Dahrul Ehsan yang mula-mula sekali mewujudkan Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak, kemudian diikuti oleh negeri-negeri lain di Malaysia Barat<sup>14</sup>.

Sultan adalah sebagai Ketua Agama dan mempunyai bidang kuasa perkara-perkara berkaitan dengan hal-hal agama Islam. Keadaan ini diamalkan sejak sebelum merdeka lagi. Sultan bagi setiap negeri di Malaysia dilantik sebagai Ketua Agama yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran agama Islam.

Bagi negeri yang tidak mempunyai institusi beraja seperti Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Wilayah dan Sabah, Ketua Agama yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran agama Islam ialah Yang Di Pertuan Agung.

---

<sup>14</sup> Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu*, Ensiklopedia Bebas, 15 Jun 2010.

Mahkamah Syariah dinamakan Mahkamah Kadi bagi menjalankan peraturan dan peruntukan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam bagi setiap negeri di Malaysia. Setiap negeri ditubuhkan sebuah Jabatan Agama Islam untuk mentadbir perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang di bawah peruntukan pentadbiran agama Islam. Mahkamah Syariah adalah satu badan penting yang berada di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam pada setiap negeri. Mahkamah Syariah juga ditubuhkan di setiap daerah bagi kebanyakan negeri untuk memudahkan lagi menjalankan pentadbiran agama Islam. Ketua bagi setiap daerah berkenaan dilantik seorang Kadi Daerah<sup>15</sup>.

Pada 3 Julai 1996, Mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju cadangan Penyusunan semula Mahkamah-Mahkamah Syariah seluruh Malaysia melalui kaedah-kaedah berikut:

1. Tubuhkan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) oleh Kerajaan Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Syarie Malaysia juga Ketua Perkhidmatan Gunasama Pegawai Syariah.
2. Wujudkan struktur organisasi JKSM

---

Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu*, Ensiklopedia Bebas, 15 Jun 2010.

3. Wujudkan empat (4) jawatan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah bagi menimbang semula kasus rayuan Mahkamah Rayuan Negeri-negeri dan Wilayah-wilayah.
4. Mengekalkan struktur Mahkamah Syariah Negeri-negeri dan Wilayah-wilayah termasuk pentauliahan Ketua Hakim Syarie serta Pegawai-pegawai Syariah.
5. Mewujudkan satu Perkhidmatan Gunasama Pegawai Syariah.
6. Kerajaan Persekutuan akan membiayai dana Pegawai Syariah<sup>16</sup>.

Adapun pada bidang Kuasa Jabatan Agama Islam Dan Mahkamah Syariah pula, Mahkamah Syariah diberi nama Mahkamah Kadi (dahulunya sebelum pemisahan antara dua agensi ini berlaku) telah diberi kuasa menjalankan peraturan dan peruntukan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam bagi setiap negeri dan daerah di Malaysia. Bidang kuasa yang diberikan adalah seperti perkawinan, penceraian, kekeluargaan serta penyelesaian harta pusaka kecil.

Mahkamah Syariah menjalankan tugas yang berasingan dengan Pejabat Agama. Pejabat Agama menjalankan pentadbiran dalam hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat Islam seperti urusan Zakat, Baitulmal, Dakwah, pendidikan, pengurusan masjid dan sebagainya mengikut kuasa bagi setiap negeri berkenaan di

---

<sup>16</sup> Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu*, Ensiklopedia Bebas, 15 Jun 2010

Malaysia. Pada masa kini semua Mahkamah Syariah telah terpisah pentadbirannya dengan Jabatan Agama Islam. Mahkamah Syariah telah ditukar identitاسnya menjadi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri. Kebanyakan negeri menjadikan Majlis Mesyuarat Dewan Undangan Negeri sebagai institusi yang tertinggi (pembuat dasar) dan diikuti Majlis Agama & Istiadat, Jabatan Mufti, Jabatan Kehakiman Syariah dan Jabatan Agama Islam<sup>17</sup>.

Adapun Perlembagaan Malaysia 1965 Kuasa Mahkamah Syariah yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia 1965 adalah seperti berikut:

1. Boleh membicara dan menghukum dengan hukuman penjara atau sanksi ke atas orang Islam sahaja.
2. Sanksi tidak melebihi RM1000.00 sahaja atau
3. 6 bulan penjara atau
4. Gabungan kedua-duanya (sanksi dan penjara)<sup>18</sup>.

Tambahan dengan Perlembagaan Malaysia 1984 Kuasa Mahkamah Syariah yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia 1984 dengan pindaan adalah seperti berikut:

---

<sup>17</sup> Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu*, Ensiklopedia Bebas, 15 Jun 2010.

<sup>18</sup> Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu*, Ensiklopedia Bebas, 15 Jun 2010.

1. Boleh berbicara dan menghukum dengan hukuman penjara atau sanksi ke atas orang Islam sahaja.
2. Sanksi tidak melebihi RM5000.00 sahaja atau
3. 3 tahun penjara atau
4. Hukuman rotan tidak melebihi daripada enam kali sebatan atau
5. Gabungan ketiga-tiganya (sanksi, penjara dan rotan)<sup>19</sup>.

Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak merupakan salah satu Daerah yang terletak di Negeri Perak Darul Ridzuan. Telah bangunnya Mahkamah ini semenjak tahun 1997 lagi, sebelum ini apa-apa urusan tentang yang berkaitan dengan perbicaraan, masyarakat disini harus berurusan dengan Mahkamah ini terletak di tengah-tengah Kota Gerik, Mahkamah ini beralamat “Mahkamah Rendah Syariah Gerik, Batu 1 3/4 , Jalan intan, 33000 Gerik, Perak Darul Ridzuan.

Mahkamah ini mempunyai 8 orang pekerja, yang di anggotai seorang Hakim, yaitu Azman Bin Saad dan 7 orang karyawan, antara jawatan yang di jawat di dalam Mahkamah itu adalah, Pembantu Pendaftar, Penolong Pendaftar, Penghantar Notis, Pembantu Am Rendah, Pembantu Tadbir, Pegawai sulh<sup>20</sup>.

Enakmen ini mempunyai 131 enakamen yang merangkumi semua aspek keluarga Islam dan merupakan pengkanunan Undang-Undang yang diadaptasi daripada fiqh munakahat itu sendiri. Sebelum Undang-undang ini digubalkan,

---

<sup>19</sup>.*Ibid*, 15 Jun 2010.

<sup>20</sup>,Abu Bakar, (Pegawai Penolong Pendaftar) *Wawancara* di Mahkamah Rendah Syariah Gerik, 22 September 2010.

Enakmen yang dipakai adalah Undang-Undang mengurus Agama Islam Perak 1965. Dalam Enakmen ini perkara yang berhubungan dengan perkawinan mempunyai 9 Enakmen sahaja. Dalam hal ini maka sudah tentu tidak merangkumi secara sempurna masalah-masalah keluarga. Dengan adanya Enakmen Undang-Undang ini, pentadbiran undang-undang keluarga Islam menjadi lebih kemas dan teratur<sup>21</sup>.

### **B. Misi, Visi, Objektif Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak**

Adapun Misi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak adalah:

“Melaksanakan pengadilan, pengurusan Mahkamah dan perkhidmatan sokongan secara professional, berkesan dan sistematik berasaskan peruntukan Undang-Undang Islam yang seragam untuk mencapai keredhaan Allah”<sup>22</sup>.

Visi Jabatan Kehakiman Syariah adalah:

“Menjadi Institusi Kehakiman Syariah Yang Berwibawa”<sup>23</sup>.

Adapun objektif Mahkamah Rendah Syariah Gerik adalah:

1. Menyegerakan pengendalian kasus-kasus Syariah dengan adil, teratur dan berkesan
2. Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai dan kakitangan dari aspek perundangan dan pengurusan.

---

<sup>21</sup>. *Ibid*, 23 September 2010.

<sup>22</sup> Jabatan Kehakiman Negeri Perak, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Perak*, (Ipoh:1992),

<sup>23</sup> *Ibid*, 1992



3. Menyediakan dan mempertingkatkan penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dalam pentadbiran.
4. Menyediakan dan mempertingkatkan kemudahan dan infrastruktur yang terbaik dan mencukupi<sup>24</sup>.

Fungsi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak adalah:

1. Menerima, mendengar dan memutuskan kasus-kasus yang dibawa ke Mahkamah Syariah mengikut Hukum Syarak dan peruntukan undang-undang.
2. Memutus, menguatkuasa dan melaksanakan perintah berasaskan Hukum Syarak dan undang-undang bertulis.
3. Menerima mendengar dan memutuskan kasus-kasus rayuan syariah secara teratur dan berkesan.
4. Menerima, mendengar dan memutuskan permohonan pembahagian harta.
5. Membangunkan sumber manusia yang terlatih dan mencukupi<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Jabatan Kehakiman Negeri Perak, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Perak*, (Ipoh:1992),

<sup>25</sup> Jabatan Kehakiman Negeri Perak, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Perak*, (Ipoh:1992),

Begitu juga dengan tujuan dan peranan Jabatan Kehakiman adalah:

1. Mengekalkan perundangan Islam yang diperuntukkan kepada mahkamah ini bagi menjamin setiap Muslim patuh dan tidak melanggar perintah Allah s.w.t berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.
2. Menjalankan pentadbiran agama Islam al-Quran dan As-Sunnah bagi menjamin kesejahteraan orang Islam
3. Melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam serta mengawasi mereka supaya menjalani kehidupan mengikut syariat Islam.
4. Menyelamatkan umat Islam daripada pepecahan dan keruntuhan rumahtangga.
5. Tempat rujukan untuk mendapatkan khidmat nasihat serta menyelesaikan masalah rumahtangga.
6. Memberi bimbingan dan nasihat konseling kepada pasangan yang ingin berumahtangga agar dapat membina rumahtangga yang bahagia sebagaimana tuntutan agama.
7. Tempat membuat rayuan daripada pihak istri untuk mendapatkan nafkah daripada suaminya yang sudah bercerai
8. Tempat menyelesaikan masalah kekeluargaan seperti nikah kawin, penceraian, talak, fasakh, dan sebagainya.
9. Menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat seperti judi, minum arak, riba, khalwat, dan lain-lain perkara mungkar.

10. Membantu serta menyelesaikan pembahagian harta pusaka dan hal-hal berkaitan seperti wasiat
11. Juga bertugas sebagai penasihat jika diminta oleh kerajaan
12. Badan yang dilantik oleh kerajaan yang bertanggungjawab memberi penerangan berkait dengan keagamaan, kekeluargaan dan sentiasa berdakwah sepanjang masa
13. Menerapkan nilai-nilai Islam agar orang Islam mengamalkan sistem dan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka<sup>26</sup>.

### C. PERLAKSANAAN PENGADILAN DI MAHKAMAH SYARIAH

Cara pelaksanaan di Mahkamah Syariah ada tiga cara, antaranya adalah Mahkamah Rendah Syariah pelaksanaannya adalah:

1. Membicarakan kasus-kasus yang diperuntukkan oleh enakmen negeri
2. Mendengar dan memutuskan kasus-kasus tersebut
3. Menyediakan kertas-kertas keputusan dan laporan mahkamah
4. Membicarakan kasus-kasus di peringkat daerah<sup>27</sup>.

Selain daripada Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah juga mempunyai cara pelaksanaannya tersendiri, antaranya adalah:

1. Membicarakan kasus-kasus yang diperuntukkan kepadanya

---

Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu*, Ensiklopedia Bebas, 15 Dec 2010.

<sup>27</sup> Jabatan Kehakiman Negeri Perak, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Perak*, (Ipoh:1992

2. Mengeluarkan perintah kasus-kasus sivil dan jenayah
3. Menyelesaikan dan mengesahkan kasus-kasus faraid
4. Menguruskan kasus-kasus rayuan
5. Menyediakan jurnal Mahkamah untuk diterbitkan (bagi sesetengah negeri)<sup>28</sup>.

Yang ketiga adalah Mahkamah Rayuan Syariah dengan perlaksanaannya adalah:

1. Bertugas untuk mendengar kasus-kasus rayuan
2. Mempunyai kuasa pembatalan mana-mana sabitan hukuman oleh Mahkamah Syariah
3. Mengurangkan hukuman
4. Memerintah supaya diadakan pembicaraan semula atau ulang bicara.
5. Menerima rayuan tertuduh yang dihukum penjara atau denda tidak kurang RM25.00 dan telah membuat rayuan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.
6. Setiap rayuan akan didengar sekurang-kurangnya oleh tiga orang panel (hakim) rayuan daripada Panel (hakim) Rayuan Syariah yang dilantik dan

---

<sup>28</sup> Jabatan Kehakiman Negeri Perak, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Perak*, (Ipoh:1992)

ditauliah oleh KDYMM Sultan (Ketua Hakim adalah Pengerusi Panel Rayuan Syariah) Keputusan mahkamah adalah muktamad dan sah<sup>29</sup>.

Permulaan Kuat Kuasa Suatu Enakmen bagi meminda dan menyatukan peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkawinan, penceraian, nafkah, penjaga dan perkara-perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga. Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Perak) 2004 Enakmen ini hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang telah di tetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan dalam warta, Enakmen ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam Negeri Perak Darul Ridzuan dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Negeri Perak Darul Ridzuan tetapi tinggal di luar Negeri itu<sup>30</sup>.

Prestasi Mahkamah Syariah Menurut Ahmad Zahid Hamidi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, sebanyak 90 peratus kasus-kasus melibatkan Mahkamah Syariah berjaya diselesaikan dalam tempoh 12 bulan, sekali gus melenyapkan tuduhan pihak

---

<sup>29</sup> . Jabatan Kehakiman Negeri Perak, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Perak*, (Ipoh:1992

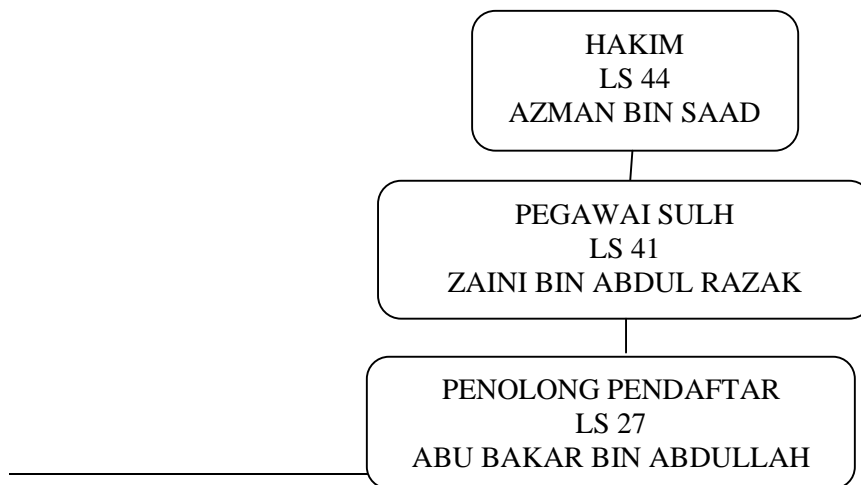
<sup>30</sup> Government Of Perak Gazette, *Warta Kerajaan Negeri Perak*, (Negeri Perak:2004) Jilke-57, h. 404

tertentu terhadap institusi itu yang dikatakan lewat menyelesaikan sesuatu kasus dan kerap tertangguh<sup>31</sup>.

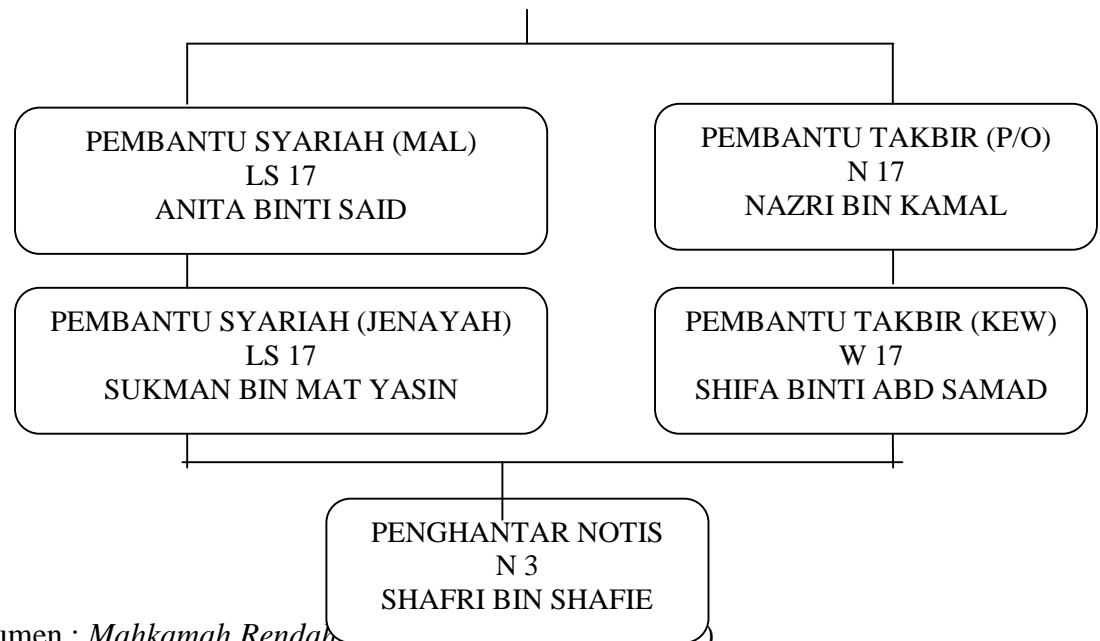
**Tabel 1**

**STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH**

**GERIK, PERAK**



<sup>31</sup> Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu*, Ensiklopedia Bebas, 15 Jun 2010.



( Dokumen : *Mahkamah Rendah* )

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG**

## **NAFKAH ‘IDDAH**

### **A. Pengertian Nafkah ‘Iddah**

Sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang nafkah ‘iddah terlebih dahulu penulis kemukakan arti ‘iddah dan nafkah. Untuk memudahkan pembahasan mengenai pengertian ‘iddah ini, maka penulis mencoba mengungkapkan dan menyajikan dari dua segi yaitu segi bahasa dan segi istilah.

#### **1. ‘Iddah dari Segi Bahasa**

Sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang nafkah ‘iddah terlebih dahulu penulis kemukakan arti ‘iddah ditinjau dari segi bahasa, ‘iddah berasal dari kata yang mempunyai arti bilangan atau hitungan<sup>14</sup>.

Dalam *Kamus Arab Indonesia* karangan Mahmud Yunus, ‘iddah berasal dari kata yang berarti menghitung<sup>15</sup>. Maka apa yang dapat disimpulkan ‘iddah dari etimologi (*lughatan*), ia berasal dari kata kerja ‘*adda-ya’uddu* ‘*addatan* yang berarti menghitung sesuatu (*ihsha’u asy-syay’i*). Dengan demikian jika ditinjau dari segi bahasa, maka menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksudkan dengan ‘iddah adalah menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan<sup>16</sup>.

#### **2. ‘Iddah dari Segi Istilah**

---

<sup>14</sup> Muhammad Idris Abdurra'uf Al Marbawy, *Kamus Idris Melayu*, Darul Fikir, Kuala Lumpur, 1990, Cet 1, h. 8-9, juz 2.

<sup>15</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1997), h. 42

<sup>16</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), II: h. 277



Para ulama' telah mengemukakan pengertian 'iddah dari segi istilah, antara yaitu:

a. Menurut Sayyid Sabiq:

اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها

Artinya: “Sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya”<sup>17</sup>.

b. Menurut Abu Zahrah:

اجل ضرب الانقضاء مابقي من آثار النكاح فإذا حصلت الفرقة بين الرجل وأهله لا تنفصم عرا الزوجية من كل الوجوه بمجرد وقوع الفرقة، بل تتربصن المرأة ولا تتزوج غيره، حتى تنتهي تلك المدة التي وقدرها الشارع.

Artinya: “Suatu masa yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan sesuatu yang ketinggalan dari bekas nikah apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka ikatan perkahwinan mereka tidak terputus dari segala sesuatu jalan disebabkan terjadinya perceraian itu tetapi perempuan atau istri itu harus menunggu, tidak boleh berkahwin dengan orang lain sehingga selesai masa yang ditetapkan oleh syara”<sup>18</sup>.

c. Sedangkan Menurut Wahbah az-Zuhaili, 'iddah merupakan masa yang ditentukan oleh syari' pasca perceraian, dimana dalam masa tersebut perempuan diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai masa tersebut<sup>19</sup>.

Pengertian 'iddah yang dikemukakan oleh para fuqaha di atas, kebanyakan mereka hanya menitik beratkan kepada tujuan 'iddah itu untuk kesucian rahim semata, sedangkan 'iddah itu bukan untuk kesucian rahim saja, tetapi masih banyak

<sup>17</sup> Ibid, h. 277

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ahwalus Syahsiyyah*, (As-Sya'adah, 1957), Cet. 3, h. 435

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. IV (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997), IX: h. 7166

maksud yang lainnya perlu dikaji secara cermat dan mendalam. Antaranya yang dapat diambil suatu pengertian bahwa ‘iddah itu mempunyai beberapa unsur yaitu:

- a. Suatu tenggang waktu tertentu.
- b. Wajib dijalani si bekas istri.
- c. Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya.
- d. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah.

Dengan memperhatikan ketentuan ‘iddah tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa ‘iddah adalah suatu masa tunggu yang ditetapkan oleh syara’ bagi seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya baik cerai hidup ataupun cerai mati, dalam masa tunggu tersebut ia tidak boleh menerima pinangan orang lain atau kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa ‘iddahnya (tunggunya). Dalam hal iddah ini wanita (mantan istri) tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa ‘iddahnya.

Dan Nafkah secara bahasa adalah belanja untuk memelihara kehidupan<sup>20</sup>, dan menurut ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh yang wajib memberi nafkah kepada seseorang baik berbentuk roti, gulai, pakaian dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup. Iddah menurut bahasa adalah waktu menanti bagi perempuan yang ditalak atau kematian suaminya<sup>21</sup> dan menurut ahli fiqh, kata iddah berasal dari bahasa Arab yang berarti menghintung, menduga,

---

<sup>20</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Cet. Ke XII, h.667.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 368.

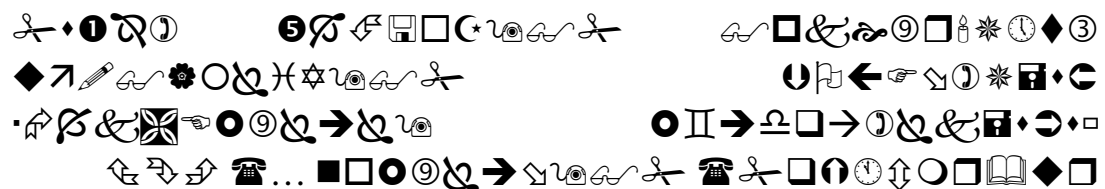
mengira,. Menurut Sayyid Sabiq memberikan pengertian dengan “masa lamanya bagi perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya”<sup>22</sup>. Jadi menurut bahasa nafkah ‘iddah adalah pemberian biaya belanja untuk memelihara kehidupan terhadap perempuan yang ditalak.

## B. Dasar Hukum

Setelah membahas masalah nafkah 'iddah dari segi pengertian, maka di bawah ini penyusun bahas dasar-dasar hukum iddah yang mengacu pada memperjelas tentang nafkah 'iddah itu sendiri.

## 1. Dasar dari Al Qur'an

Secara eksplisit al-Qur'an dan al-Hadith banyak sekali menjelaskan tentang 'iddah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:



<sup>22</sup> Sayyaid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Drs. Muhammad Thalib, Al Ma'arif, Bandung, cet. XX, tth. h. 150.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang; Cv. Toha putra, 1989), h. 945

Allah menegaskan kepada para Nabi bahwa jika mereka menceraikan istri mereka, maka harus dilihat dahulu waktu untuk menceraikan tersebut agar istri dapat menjalankan 'iddah mereka dengan sempurna dan dengan wajar, disamping ayat ini ditujukan Nabi juga ditujukan kepada ummat manusia agar apabila menceraikan istri-istri juga harus melihat waktu untuk menceraikan (*thalaq*) agar 'iddah itu dapat dijalankan dengan sempurna dan secara wajar oleh istrinya.

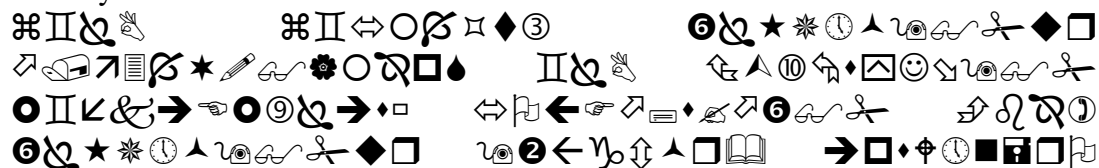
Allah juga menerangkan dalam surat al-Baqarah dengan Firman-Nya yang berbunyi:



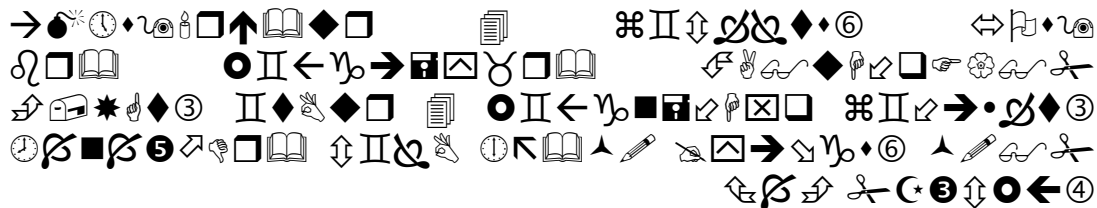
Artinya : “Istri yang dithalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimny mereka”<sup>24</sup>. (Q.S. Al Baqarah : 228).

Ayat di atas walaupun sebenarnya telah dinasakh oleh ayat yang kemudian, akan tetapi kandungan dari hukum ayat tersebut tetaplah dipakai dan dipergunakan sebagai dalil hukum dalam penetapan hukum Islam syara’ yang berkenaan dengan masalah iddah istri. Ayat yang demikian ini dalam istilah ilmu ulumul qur’an disebut dengan *baqouttilawah wa hukmi adamul*.

Didalam ayat lain juga menerangkan dalam surat At-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:



<sup>24</sup> *Ibid*, h.. 55



Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang putus dari *haid* diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang *hamil* waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan”<sup>25</sup>.

Surat at-Thalaq ayat 4 diatas pertama menjelaskan bahwa wanita yang dithalaq oleh suaminya maka mereka wajib menunggu (ber’iddah) tiga bulan, dimana masa tunggu ini khususnya kepada wanita yang tidak haid lagi (monopouse) atau tidak haidnya wanita kerana penyakit atau belum pernah haid, dimana mereka wajib menunggu (ber’iddah) selama tiga bulan. Yang kedua ayat diatas, menjelaskan bahwa ‘iddah (masa tunggu) itu ditujukan kepada wanita yang hamil dimana dikala itu seorang suami menceraikan istrinya, maka ‘iddahnya adalah sampai perempuan tersebut melahirkan anak yang ada di dalam kandungannya. Ini dimaksudkan agar nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat terpelihara dengan baik dengan adanya ‘iddah sampai melahirkan tersebut.

## 2. Dasar dari Hadits

Adapun di antara hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang menjadi dasar hukum ‘iddah adalah diantaranya dijelaskan dalam hadits riwayat Darul Qutni yang berbunyi:

<sup>25</sup> Ibid, hal. 96

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : طلاق الامة تطليقتان زعدتها حيضتان. (رواه دار القطني)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Dia berkata: “Thalaq budak wanita itu dua kali dan ‘iddahnya dua kali haid”<sup>26</sup>.

Didalam hadits lain juga dijelaskan:

عن فاطمة بنت قيس قالت : قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Fatimah bin Qais ra. Aku berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku telah menceraikan aku dengan tiga thalaq. Aku khawatir ada orang masuk kekamarku. Lalu beliau (nabi) memerintahkan dia pindah dan akhirnya dia pindah”. (HR. Muslim)<sup>27</sup>

عن عائشة رضي الله عنهما قالت : أمرت بربرة ان تعتد بثلاث حيض. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari ‘Aisyah ra. Dia berkata: “Barirah pernah diperintahkan agar menunggu (masa ‘iddah) hingga tiga haid”. (HR. Ibnu Majah)<sup>28</sup>

Dari keterangan hadits diatas dapat dipahami bahwa dasar hukum ‘iddah disamping diterangkan oleh Allah dalam al-Quran juga diterangkan oleh Allah dalam hadits Nabi, ketika wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati wajib mereka ber’iddah setelah terjadi perceraian dengan suaminya

<sup>26</sup> Al-Hafidh ibnu Hajar al-Ashqalani, *Bulughul Margham*, (Mekkah, 1378H), h. 228.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 228

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 229

dan tidak membedakan apakah seorang yang mereka merdeka atau seorang hamba sahaya. Dimana seorang istri yang bercerai tersebut tetap tinggal dirumah suaminya, dan tidak boleh mereka keluar kecuali untuk hal-hal yang baik-baik dan tidak boleh mereka berhias kecuali hanya sekedar untuk kebersihan dirinya. Sebab wanita yang dithalaq suaminya masih dalam tanggung suaminya. Dan wanita yang kematian suaminya (cerai mati), tidak boleh lebih dari empat puluh sepuluh hari perempuan tersebut disuruh tinggal di rumah suaminya, sebagai masa berkabung atas kematian suaminya dan setelah habis masa empat bulan sepuluh hari tersebut berilah hak kepada perempuan tersebut untuk menentukan dirinya.

### **C. Macam-Macam ‘Iddah**

‘Iddah tidaklah selalu sama pada setiap wanita, al-Qur’an memberikan petunjuk dalam berbagai ungkapan yang menegaskan bahwa masa ‘iddah itu ditetapkan berdasarkan keadaan wanita sewaktu diceraikan atau ditinggalkan mati oleh suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian, apakah cerai mati atau cerai hidup. Maka dari ini, dapat diketahui macam-macam ‘iddah. Antaranya :

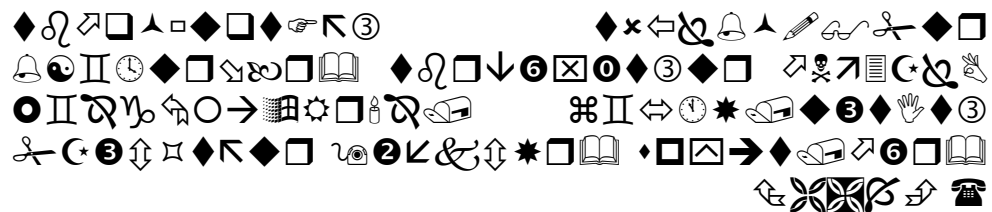
#### **1. ‘Iddah karena thalaq *raj’i***

‘Iddah seorang wanita yang di thalaq *raj’i* (cerai tetapi suami masih diperkenankan untuk kembali ke pangkuan istri) tempohnya haid tiga kali suci (*tsalaatsata quru’*) sesuai firman Allah swt dalam al-Qur’an yang berbunyi :



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.....<sup>29</sup>.” (QS: Al-Baqarah : 228)

Kata ‘quru’ pada ayat di atas menjelaskan tentang suci , oleh karena itu, seorang wanita yang telah di thalaq suaminya maka ia harus menunggu 3 kali suci baru wanita tersebut boleh menikah lagi dengan lelaki lain. . Tiga kali suci adalah tiga haidh, jadi wanita yang diceraikan suaminya baru boleh menikah lagi +- 90 hari<sup>30</sup>. Dalam tempoh ‘iddah, istri berhak menerima nafkah serta seluruh hak-haknya, kecuali biaya merias diri karena dia bukan lagi milik sang suami, terkecuali tidak bisa tidur karena kotor. Selain itu, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang diceraikan jika masih *tamkin*<sup>31</sup>. Berbeda tentunya ‘iddah seorang wanita yang ditinggalkan suaminya karena meninggal dunia. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi :



Artinya :“Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari” (Q.S al-Baqarah : 234)<sup>32</sup>.

## 2. ‘Iddah karena Thalaq Ba’in

<sup>29</sup>Departemen agama Islam RI, *Op.Cit*, h. 55.

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan al-Fiqhu As-Syafi’I al-Muyassar*, penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi’I*, (Jakarta: al-Amirah, Cet 1, 2010), Jilid III, h. 5.

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit* , h. 53.

<sup>32</sup> Departemen agama Islam RI, *Op.Cit*,h. 1060



Istri idak berhak menerima nafkah dari mantan suaminya karena thalaq ba'in<sup>33</sup> dengan cara thalaq khulu atau thalaq tiga kali. Sebab, telah terputusnya hubungan perkahwinan sehingga status istri adalah seperti perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya<sup>34</sup>.

### 3. Iddah dalam masa hamil

Perempuan yang diceraikan dan menjalani masa 'iddah dalam masa hamil maka dia berhak untuk mendapatkan nafkah dan pakaian serta seluruh biaya hidup yang lain. sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Al-quran:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ أَهْلُ الْحَمْلِ أَجْلَهُمْ فَلَكُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ تَتَبَعَوا إِلَيْهِمْ سُبُلَكُمْ لِتَبْلُغُوا بِهِنَّ أَجْلَهُمْ ذُرِّيَّتَهُنَّ فَإِنْ فَتِدْنَ يُبْلِغْنَ ذُرِّيَّتَهُنَّ أَجْلَهُنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَالَّذِينَ طَلَّقُوا النِّسَاءَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ أَهْلُ الْحَمْلِ أَجْلَهُمْ فَلَهُنَّ أَجْلُهُنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَالَّذِينَ طَلَّقُوا النِّسَاءَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ أَهْلُ الْحَمْلِ أَجْلَهُمْ فَلَهُنَّ أَجْلُهُنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكُمْ﴾

Artinya: "Tempatkan lah (para istri) dimana kamu bertempat menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka; dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, tetapi jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"<sup>35</sup>. (TQS. Ath-Thalaq : 6)

### 4. 'Iddah sebab ditinggal mati oleh suaminya.

<sup>33</sup> Cerai yang dilakukan tiga kali oleh mantan suami atau dengan thalaq khulu' yaitu gugatan cerai yang dilakukan oleh istri dengan mengembalikan maskawin atau sejenisnya.

<sup>34</sup> *Ibid.* h. 54

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quranul Karim*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), hal 558

Sedangkan perempuan yang ber'iddah karena suaminya tidak berhak mendapatkan. Menurut pendapat yang *rajih* dalam mazhab as-Syafi'I, istri berhak mendapat tempat tinggal dari hal demikian<sup>36</sup>.

Hikmah Disyariatkannya Iddah adalah<sup>37</sup>:

1. Sebagai Pembersihan Rahim
2. Kesempatan untuk berfikir
3. Kesempatan untuk bersuka cita
4. Kesempatan untuk rujuk

Hak dan kewajiban Suami Istri pada Masa Iddah<sup>38</sup>:

1. Hak Istri pada Masa Iddah<sup>39</sup>.
  - a. Mendapatkan nafkah Selama masa Iddah
  - b. Mendapat perumahan Selama masa Iddah
  - c. Istri berhak memutuskan untuk rujuk kembali, sedangkan kewajiban istri adalah masa berkabung bila ia ditinggalkan mati suaminya.
2. Kewajiban suami pada masa 'iddah istri
  - a. Suami wajib memberi nafkah pada istri
  - b. Suami wajib memberikan perumahan pada istri
  - c. Suami berhak untuk merujuk kembali atau tidak

Maka dapat disimpulkan bahwa setelah terjadinya perceraian maka mantan suami masih mempunyai kewajiban yang diembankan kepadanya yaitu memberikan nafkah serta tempat yang layak kepada mantan istrinya selama masa iddah.

---

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit* , h. 54

<sup>37</sup> Kamal Muhtar, *Asas Hukum Perkahwinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Cet. II, h. 230

<sup>38</sup> Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h.95

<sup>39</sup> Ghafani Awang Teh, *Selepas Perceraian Apakah Hak Wanita yang Perlu Dituntut*, Jabatan kemajuan Islam Malaysia (Putrajaya : JAKIM, Cet V, 2002) , h. 7-12.

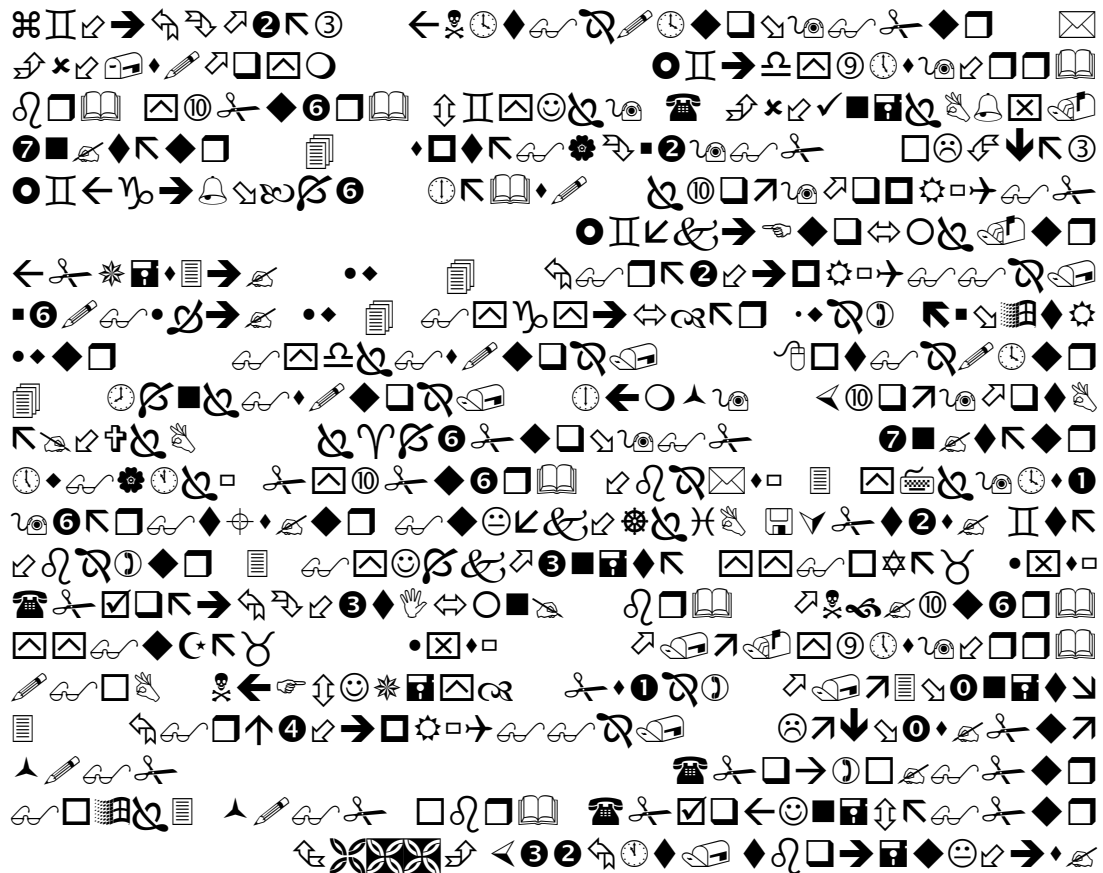
<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quranul Karim*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), hal 558  
<sup>41</sup> Ghafani Awang Teh, *Op.cit*, hal 7-12

4. Istri yang ditalak ba'ian tidak disebabkan khulu'.

### E. Ukuran Nafkah Iddah

Adapun nafkah sewaktu iddah disesuaikan dengan nafkah waktu nikah

(nafkah sehari-hari sebelum bercerai). Sebagaimana firman Allah:



Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>42</sup>. (TQS. Al-Baqarah [2]:233)

Al-Syafi'i mengatakan, bahwa yang dimaksudkan nafkah 'iddah disini adalah dua macam, yaitu: nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang yang dalam keadaan kaya bagi yang miskin maka ia cukup memberikan satu *mud*<sup>43</sup> makanan pokok yang berlaku di negeri tempat ia hidup kepada istrinya dan pembantunya. Dan cukup pada setiap pekannya memberikan daging. Selain itu, ia juga berkewajiban memberikan pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya<sup>44</sup>.

Jika Suaminya itu orangnya yang berada (kaya), maka ia berkewajiban memberikan istrinya dua *mud*. Juga lauk-pauk dan daging yang jumlahnya dua lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin. Dia juga harus memberikan minyak dan sisir. Sedangkan kepada pembantunya, maka ia harus memberi satu seperempat *mud*. Berkenaan dengan ini Imam Syafi'i mengatakan: bagi orang yang miskin berada dalam kesulitan adalah satu *mud*. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan dua *mud*. Dan yang berada diantara keduanya adalah satu setengah *mud*<sup>45</sup>.

Menurut Abu Hanifah, bagi orang yang berada dalam kemudahan maka ia harus memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 37.

<sup>43</sup> 1 *mud* = 1,5 Kg.

<sup>44</sup> Syaikh Hassan Ayyub, *Terjemahan Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006), Cet. Ket II, h.384.

<sup>45</sup> Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet Ke II, 2002), h. 519.

berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya<sup>46</sup>.

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengatakan bahwa ukuran nafkah tidak diperlukan ukuran tertentu, hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dalam individu. Pada waktu tertentu kadang lebih mementingkan makanan dari pada yang lainnya. Demikian halnya dengan tempat, terkadang ada sebahagian keluarhga yang membiasakan keluarganya makan dua kali dalam sehari. Di lain tempat ada yang membiasakan tiga kali dalam satu hari dan ada juga samapai empat kali dalam satu hari. Tidak berbeda halnya dengan keadaan yang terkadang pada masa lebih memerlukan adanya penentuan ukuran makanan disebanding ketika pada masa subur<sup>47</sup>.

Seluruh Imam Mazhab sepakat apabila istri *nusyuz* apabila meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau menolak tinggal di rumah (suami) yang layak baginya, ia tidak berhak mendapatkan nafkah sedikitpun, hanya saja Syafi'I dan Hanbali menambahkan bahwa apabila istri keluar rumah demi kepentingan suami (masa iddah pada talak *raji'i*) dan keluarga maka hak atas nafkah tidak gugur<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Syaikh Hassan Ayyub, *Op.cit*, h. 385.

<sup>47</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Terjemahan Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006), Cet. Ke XXII, h. 453.

<sup>48</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzhabib al-Khamsah*, Penerjemah Masykur A.B, Afifi Muhammad, dan Idrus Al-Khaff, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakrta: Lentera, 2008), Cet. Ke XXI, h. 404.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Aplikasi Pemberian Nafkah Iddah Istri di Mahkamah Rendah Syariah Gerik, Perak**

Mahkamah Syariah adalah lembaga yudikatif yang secara teori bersifat ‘*idependen*’ berfungsi mengadili berbagai perkara yang ada di tengah masyarakat. Mahkamah Syariah adalah lembaga yudikatif mengadili perkara hukum di lingkungan privat (peribadi) khususnya kasus-kasus yang lahir dalam rumah tangga misalnya di bidang perceraian, *thalaq*, *rujuk*, waris dan sebagainya. Secara hukum, keluarga yang berpekar dapat mencari jalan penyelesaian akhirnya di Mahkamah Syariah tersebut, misalnya perceraian antara suami istri. Ketika antara suami dan istri konflik namun ditempuh jalan musyawarah tidak kunjung selesai, maka penyelesaian final (ending) dari konflik adalah perceraian.

Perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan hakim di mahkamah. Akan tetapi konflik antara suami dan istri yang penyelesaian akhirnya tidak di depan hakim di mahkamah, maka perceraian tersebut dianggap tidak sah atau dikenal dengan perceraian di bawah tangan (*under hand*) tanpa persetujuan hakim di Mahkamah. Meskipun seorang suami telah menjatuhkan *thalaq* atas istrinya lebih dari tiga kali.

Bab ini penulis memfokuskan kepada pelaksanaan putusan Mahkamah Syariah Gerik Perak terhadap suami yang mesti membayar nafkah ‘iddah kepada

istrinya sesuai dengan putusan Mahkamah tersebut. Karena membayar nafkah ‘iddah merupakan kewajiban utama yang harus dilaksanakan seorang suami terhadap istrinya baik itu pangan, sandang dan tempat tinggal yang layak. Pada table berikut ini di paparkan jawaban responden terhadap aplikasi putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik tentang pemberian Nafkah ‘iddah.

**TABEL 4. 1**

**PENGETAHUAN RESPONDEN TENTANG NAFKAH ‘IDDAH**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuesi</b>	<b>Persentase</b>
1	Mengetahui	24	80 %
2	Tidak Mengetahui	-	
3	Kurang Mengetahui	6	20 %
	Jumlah	30	100%

Sumber Data: **Data olahan Angket Penelitian 2010**

Dari Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang nafkah ‘iddah sebanyak 24 responden atau 80 % menjawab mengetahui sementara kurang mengetahui yaitu 6 responden atau 20 %. Sedangkan tidak mengetahui sama sekali tidak ada.

Dari table di atas dapat dipahami bahwa sedikit sahaja pengetahuan responden yang kurang mengetahui tentang nafkah ‘iddah dibandingkan mayoritas responden mengetahuinya, ini disebabkan penggunaan bahasa ‘iddah itu sendiri yang membuatkan sedikit responden tersebut kurang mengambil tahu hal demikian. Karena daerah (kecamatan) Gerik Perak ini sebahagian penduduk masyarakatnya



berada di luar kota, maka fasilitas serta penerapan pengetahuan mengenai nafkah ‘iddah itu kurang sampai. Hal ini bisa dilihat jelas jawaban dari pertanyaan berikutnya tentang kewajiban suami menafkahi istri setelah perceraian.

**TABEL 4. 2**  
**KEWAJIBAN SUAMI MENAFKAHI MANTAN ISTRI SETELAH**  
**PERCERAIAN**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Wajib	30	100 %
2	Tidak Wajib	-	-
3	Harus	-	-
	Jumlah	30	100 %

Sumber Data: **Data olahan Angket Penelitian 2010**

Dari Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa pengakuan semua responden tentang kewajiban suami menafkahi istri setelah berlaku perceraian adalah wajib yaitu 30 responden atau 100 % sementara yang mengatakan tidak wajib dan harus sama sekali tidak ada atau nihil. Hal ini menunjukkan bahwa suami itu mengetahui kewajibannya menafkahi istri setelah berlakunya perceraian.

Beberapa orang istri justru mengakui bahwa suami mengetahui kewajibannya dan ia melaksanakan pembayaran nafkah ‘iddah tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Hal ini bisa dilihat pada data yang terdapat pada table dibawah ini :

**TABEL 4.3**  
**PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH ‘IDDAH OLEH SUAMI**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Dapat di Laksanakan	22	73,33 %
2	Kurang di Laksanakan	6	20,00 %
3	Tidak Dapat di Laksanakan	2	6,67 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber Data: **Data olahan Angket Penelitian 2010**

Dari Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden pelaksanaan pembayaran nafkah ‘iddah oleh suami terhadap istri sebanyak 22 istri atau 77,33 % dapat di laksanakan sementara kurang di laksanakan sebanyak 6 istri atau 20 % sedangkan tidak dapat di laksanakan sebanyak 2 istri atau 6,67 %. Di samping itu dari hasil wawancara penulis kepada mantan istri yaitu ibu Rosmahwati<sup>14</sup> ketika saya bertanya adakah suami ibu melaksanakan pembayaran nafkah ‘iddah setelah perceraian dapat dilaksanakannya, dia mengatakan suami saya (Abdul Rasyid) dapat melaksanakan nafkahnya. Dan dia perhatian terhadap tanggungjawabnya. Dan menurut ibu Halimah<sup>15</sup>, suami saya kurang melaksanakan nafkahnya setelah putusan mahkamah karena suami saya ini seorang yang merantau yang bekerja sebagai supir lori (trak), pada bulan pertamanya dia membayar nafkah ‘iddah dan anak-anaknya dan kemudiannya kurang melaksanakan (sering menunda-nunda pembayaran). Sedangkan yang di maksudkan dapat di laksanakan tersebut adalah suami yang

---

<sup>14</sup> Rosmahwati (Istri), Wawancara, Tgl 21 Desember 2010

<sup>15</sup> Halimah (istri), Wawancara, Tgl 22 Desember 2010

menunaikan hak dan kewajibannya terhadap istri setelah berlakunya perceraian atau putusan Mahkamah atas pembayaran nafkah 'iddah selama dalam waktunya.

Dari jawaban angket di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mengatakan suami melaksanakan pembayaran nafkah 'iddah terhadapnya berjumlah 22 orang responden dengan persentase 73,33 % (persen). Waktu lama pelaksanaan pembayaran nafkah 'iddah tersebut dapat dilaksanakan atau tidak oleh suami di dalam menunaikan kewajibannya, hal ini dapat diketahui pada table dibawah ini:

**TABEL 4. 4**

**MASA KEWAJIBAN PEMBAYARAN NAFKAH 'IDDAH**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	3 Bulan kebawah	17	56,67 %
2	3 bulan Keatas	11	36,67 %
3	Tidak ada	2	6,67 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber Data: **Data olahan Angket Penelitian 2010**

Dari Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang masa kewajiban suami dalam menunaikan pembayaran nafkah 'iddah terhadap istri, yaitu 3 bulan kebawah 17 orang responden atau 56,67 % sementara 3 bulan keatas 11 orang responden atau 36,67 % sedangkan tidak ada menunaikan kewajibannya sebanyak 2 orang responden atau 6,67 %. Disamping itu dari hasil wawancara penulis dengan responden yaitu ibu Jamilah<sup>16</sup> lama menunaikan kewajiban ini disebabkan katanya, oleh karena suami belum dapat pekerjaan yang tetap, hanya

---

<sup>16</sup> Jamilah (istri), wawancara, Tgl 21 Desember 2010

jualan niaga di kaki lima jalanan dan ekonomi yang tidak menentu menyebabkan suami melambatkan pembayarannya. Dan sebahagian responden lain ibu Laila<sup>17</sup>, ditanya berapa lama suami menunaikan kewajiban terhadapnya, dia mengatakan tidak ada sama sekali pun suaminya membayar dan menunaikan kewajibannya setelah putusan di Mahkamah Syariah dan si suami menghilang begitu sahaja, dan nasib saya mempunyai pekerjaan sendiri dalam menanggung diri dan anak-anak.

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa lebih dari persentase menunaikan kewajiban pembayaran nafkah 'iddah terhadap istri dalam tempoh 3 bulan kebawah yaitu sebelum habis masa 'iddah istri. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya yang dikutip melalaui firman Allah Swt, dimana iddah seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya selama 3 (tiga) kali suci. Oleh karena itu, suami harus membayar nafkah 'iddah kepada istri sebelum mantan istri 3 haid (3 kali suci). Manakala sebanyak 11 orang responden atau 36,67 % (persen) di atas 3 bulan. Hal ini karena suami yang sering menunda-nundakan pembayaran dan menganggap istri redha denga perlakuannya menjadi alasan tempoh waktu menjadi 3 bulan keatas. Sementara menurut wawancara peneliti dengan salah seorang Pembantu Syariah (MAL) Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak, beliau menjelaskan bahwa waktu dispensasi yang diberikan kepada suami untuk membayarkan hak 'iddah istri tidak lebih waktu selama (satu) tahun<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Laila (istri), *Wawancara*, Tanggal 22 Disember 2010

<sup>18</sup> Anita Binti Said (Pembantu Syariah (MAL) ), *Wawancara*, Mahkamah rendah Syariah gerik Perak, tanggal 23 Disember 2010.

Kesepakatan waktu pembayaran nafkah ‘iddah istri di atas haruslah dipenuhi oleh suami. Ketika suami tidak melaksanakan hasil putusan yang telah disetujui dan disanggupi di depan Pengadilan dalam waktu yang ditentukan, maka istri melaporkan perilaku suaminya untuk dilanjutkan atau dieksekusikan sebagaimana 2 orang responden atau 6,67 % (persen). Hal ini dapat diperakui daripada pendapat responden tentang suami yang tidak menunaikan kewajibannya melalui tabel dibawah:

**TABEL 4. 5**  
**PENDAPAT RESPONDEN TENTANG SUAMI YANG TIDAK**  
**MENUNAIKAN KEWAJIBAN NAFKAH ‘IDDAH**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	-	-
2	Tidak Setuju	30	100 %
3	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	30	100 %

Sumber Data: **Data olahan Angket Penelitian 2010**

Dari Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa pendapat istri tentang suami yang tidak menunaikan kewajiban nafkah ‘iddah adalah tidak setuju yaitu 30 istri atau 100 % sementara setuju dan tidak tahu sama sekali tidak ada atau nihil.

Sebagaimana wawancara penulis daripada salah seorang responden Siti Zubaidah<sup>19</sup> tentang tidak bersetuju beliau suami yang tidak menunaikan kewajiban nafkah ‘iddah, dia mengatakan kenapa perlu bersetuju jika mantan suami tidak

---

<sup>19</sup> Siti Zubaidah, *Wawancara*, Tgl 22 Disember 2010

melaksanakan kewajibannya, padahal ia adalah hak istri selepas bercerai. Dan ibu siti zubaidah juga menambah bahwa berkemungkinan seseorang istri itu setuju jika ia redha dan tidak ambil tahu tentang haknya.

Dari jawaban pendapat responden di atas dapat disimpulkan bahwa semua responden (mantan istri) tidak setuju sama sekali terhadap mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden tentang peran Mahkamah Syariah dalam menyempurnakan putusannya melalui tabel di bawah:

**TABEL 4. 6**

**PUTUSAN MAHKMAH SYARIAH BERSIFAT MENGIKAT TENTANG  
NAFKAH ‘IDDAH**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Mengikat	19	63,33 %
2	Kurang Mengikat	11	36,67 %
3	Tidak Mengikat	-	-
	Jumlah	30	100 %

Sumber Data: **Data olahan Angket Penelitian 2010**

Dari Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang putusan Mahkamah Syariah bersifat mengikat tentang nafkah ‘iddah yaitu sebanyak 19 responden atau 63,33 % mengatakan mengikat sementara 11 responden atau 36,67 % mengatakan kurang mengikat dan sedangkan yang mengatakan tidak mengikat sama sekali tidak ada.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mengatakan keputusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak adalah bersifat mengikat sebanyak 63,33 % (persen). Ini karena mayoritas yang mengatakan bersifat mengikat dari putusan Mahkamah Syariah tersebut dengan alasan pelaksanaan pembayaran nafkah 'iddah mereka terlaksana oleh mantan suami mereka. Sementara baki persennya yang lain sebanyak 36,67 % (persen) atau 11 orang responden mengatakan kurang bersifat mengikat dan memaksa, hal ini karena apa yang ditinjau peneliti di Pengadilan/Mahkamah Syariah Gerik Perak dalam hal ini bersifat pasif setelah diputuskan besar nafkah 'iddah bagi mantan istri dan waktu kesanggupan membayar nafkah 'iddah tersebut. Di mana Mahkamah (pengadilan) menunggu laporan dari pihak yang dirugikan dan selanjutnya baru digunakan haknya dalam mengadili perkara, meski pun pengadilan mengetahui adanya pihak yang belum dipenuhi haknya (mantan istri) setelah diputuskannya perkara oleh Hakim Mahkamah Syariah. Mahkamah rendah Syariah tidak dapat bertindak karena istri belum mengajukan melaporkan tindakan kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh suaminya. Mahkamah dalam hal ini beranggapan ketika mantan istri tidak melaporkan tindakan kelalaian atau kesengajaan tersebut, maka permasalahan ini dianggap selesai (istri redha dengan suami). Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah mengenai putusan Mahkamah Syariah sesuai dengan kebutuhan istri:

**TABEL 4. 7****PUTUSAN MAHKMAH SYARIAH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ISTRI**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sesuai	22	73,33 %
2	Tidak Sesuai	-	-
3	Kurang Sesuai	8	26,67 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber Data: **Data olahan Angket Penelitian 2010**

Dari Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang putusan Mahkamah Syariah sesuai dengan kebutuhan istri dalam nafkah 'iddah sebanyak 22 responden atau 73,33 % mengatakan sesuai sementara kurang sesuai 8 responden atau 26,67 % dan sedangkan yang mengatakan tidak sesuai sama sekali tiada.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas mantan istri mengakui bahwa putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak sesuai dengan kebutuhan nafkah 'iddah mereka. Hal ini menunjukkan Mahkamah Syariah meletakkan posisi hak istri bersesuaian dengan apa yang dikehendakinya. Hanya sebahagian baki yang kecil yang mengatakan bahwa kurang sesuai sebanyak 26, 67 % (persen) atau 8 orang responden. Hal ini menunjukan bahwa kaitan keputusan yang kurang mengikat dan kurang sesuai dari kebutuhan mantan istri terhadap putusan Mahkamah Syariah ini juga didasari dari kendala-kendala mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah:



**TABEL 4. 8**  
**KENDALA-KENDALA MANTAN SUAMI TIDAK MELAKSANAKAN**  
**PUTUSAN MAHKAMAH**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Ekonomi	19	63,33 %
2	Kelalaian/Kesengajaan	9	30 %
3	Beranggapan istri redha	2	6,67 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber Data: **Data olahan Angket Penelitian 2010**

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang kendala-kendala mantan suami tidak melaksanakan putusan Mahkamah yaitu sebanyak 19 responden atau 63,33 % faktor ekonomi sementara kelalaian atau kesengajaan sebanyak 9 responden 30 % dan sedangkan beranggapan istri redha sebanyak 2 responden atau 6,67 %.

Sementara dari hasil wawancara penulis dengan responden Faridah<sup>20</sup>, ketika penulis bertanya tentang apa kendala-kendala atau sekatan-sekatan yang menjadi penyebab suami tidak melaksanakan keputusan Mahkamah, dia mengatakan adalah kesengajaan atau kelalaian, kerna katanya thabi'at manusia secara umumnya selalu menunda-nunda suatu pekerjaan dan memandang remeh (memandang sesuatu perkara tidak penting). Peneliti berpendapat bahwa kelalaian ini dikeranakan kurangnya paksaan atau ketegasan dari putusan yang ada di Mahkamah Syariah. Pada dasarnya secara umum seseorang bersegera melakukan sesuatu dikeranakan

---

<sup>20</sup> Faridah (istri), *Wawancara*, Tgl 22 Disember 2010

adanya paksaan berupa sanksi yang tegas bila mengindahkan suatu putusan telah ditetapkan Mahkamah.

Sedangkan menurut wawancara penulis, En.H. Nazri bin Kamal yaitu Pembantu Takbir (Panitera), dia mengatakan faktor ekonomi sering ditemukan dalam putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah tentang kewajiban membayar nafkah 'iddah mantan istri. Tidak mampu bukan hal yang disengaja, meski disanggupi untuk membayar nafkah 'iddah istri saat di depan Mahkamah. Akan tetapi, dalam perjalanannya suami belum dianugerahi rezeki yang lebih, sehingga menjadi kendala atau hambatan untuk memenuhi nafkah 'iddah tersebut<sup>21</sup>. Hal ini bisa dilihat dari jawaban responden tentang mekanisme pembayaran nafkah 'iddah oleh suami pada tabel berikutnya:

**TABEL 4. 9**

**MEKANISME PEMBAYARAN NAFKAH 'IDDAH**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Secara Langsung	21	70 %
2	Potongan Gaji	9	30 %
3	Berhutang	-	-
	Jumlah	30	100 %

Sumber Data: **Data olahan Angket Penelitian 2010**

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang mekanisme pembayaran nafkah 'iddah secara langsung yaitu sebanyak 21

---

<sup>21</sup> En. H. Nazri Bin Kamal (Pembantu Takbir), *Wawancara*, Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak, Tgl 23 Desember 2010.

respondan atau 70 % sementara sebanyak 9 responden atau 30 % mengatakan melalui potongan gaji dan berhutang sama sekali tidak ada atau nihil.

Sedangkan menurut wawancara penulis dengan Pembantu Takbir<sup>22</sup> tentang mekanisme pembayaran nafkah 'iddah oleh suami secara langsung yaitu suami dapat membayarnya secara langsung di Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak atau tempat berpekara setelah diputuskan besarnya 'iddah yang telah ditetapkan hakim di Mahkamah Syariah Gerik. Dalam hal ini, pembayaran nafkah 'iddah dibayarkan kepada hakim Mahkamah Syariah, pihak pengadilan akan menyerahkan kepada istri bersangkutan.

Manakala melalui potongan gaji (attachment) jika pihak yang mendapat perintah tersebut mempunyai majikan yang perintah boleh diserahkan kepada majikan. Jika majikan tidak mematuhi perintah Mahkamah, boleh dikenakan apabila sabit kesalahan itu penjara selama tempoh tidak melebihi daripada setahun atau denda sebanyak tidak lebih daripada RM1000.00 (Rp 2.900.000) atau kedua-duanya sekali hukuman penjara dan denda. Jika madin penghakiman tersebut tidak mempunyai majikan, sumber lain penyewaan atau harta yang boleh dijual boleh digunakan untuk tujuan penguatkuasaan. Cara ini juga boleh digunakan jika madin penghakiman hanya mempunyai harta dalam bentuk saham sama ada didaftar atau tidak atas nama madin penghakiman<sup>23</sup>, stok atau debentur<sup>24</sup>. Permohonan boleh

---

<sup>22</sup> En.H. kamal, *Op.Cit.* Tgl 23 Disember 2010.

<sup>23</sup> Madin Penghakiman: adalah Penghutang Penghakiman.

<sup>24</sup> Barang yang tidak boleh dipindahkan melalui penyerahan dalam mana-mana pinjaman atau kumpulan uang.

dibuat untuk menjual harta atau saham tersebut bagi memenuhi jumlah bayaran yang belum dijelaskan. Pada table berikut ini di paparkan jawaban responden tentang cara mahkamah mengenakan sanksi terhadap mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya.

**TABEL 4. 10**  
**CARA MAHKAMAH SYARIAH MENYURUH SUAMI AGAR**  
**MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Menasihati	17	56.67 %
2	Memberi Surat Amaran	9	30,00 %
3	Panggil hadir ke Mahkamah	4	13,33 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber Data: **Data olahan Angket Penelitian 2010**

Dari Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang cara Mahkamah Syariah menyuruh suami dalam melaksanakan kewajibannya yaitu dengan menasihati sebanyak 17 responden atau 56,67 % manakala memberi surat amaran sebanyak 9 responden atau 30 % dan sedangkan panggil hadir ke Mahkamah sebanyak 4 responden atau 13,33 %.

Dari jawaban angket di atas dapat disimpulkan bahwa cara Mahkamah Syariah menyuruh suami agar melaksanakan kewajibannya lebih kepada menasihati suami, sementara dengan mengenakan surat amaran kepada suami itu dari alasan suami menunda-nundakan pembayaran nafkah 'iddah terhadap istri selepas laporan

diterima kepada mahkamah. Sedangkan sedikit sahaja yang mengatakan panggil hadir ke mahkamah semula dalam tunjuk sebab suami tidak melaksanakan putusan.

#### **B. Sanksi bagi suami yang tidak menunaikan kewajiban Nafkah 'Iddah**

Setiap pekerjaan apapun yang tidak melaksanakan kewajibannya pasti akan ada sanksi terhadap orang yang melakukan tersebut baik kurang melaksanakan ataupun tidak sama sekali, begitu juga dengan suami yang enggan menunaikan kewajiban nafkah 'iddah terhadap istrinya tentu akan ada sanksi yang akan dikenakan terhadapnya apabila ingkar putusan mahkamah. Pada table berikut ini di paparkan jawaban responden tentang sama ada suami mengetahui akibat hukum jika tidak melaksanakan kewajibannya adalah berikut:

**TABEL 4. 11**

#### **PENGETAHUAN SUAMI MENGETAHUI AKIBAT HUKUM JIKA TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuesi</b>	<b>Persentase</b>
1	Mengetahui	30	100 %
2	Tidak mengetahui	-	-
3	Kurang mengetahui	-	-
	Jumlah	30	100 %

Sumber Data: **Data olahan Angket Penelitian 2010**

Dari Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa jawaban bahwa semua responden mengatakan mantan suami mengetahui akibat hukum jika tidak melaksanakan kewajibannya yaitu 30 responden atau 100 % sementara tidak

mengetahui dan kurang mengetahui sama sekali tidak ada atau nihil. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikutnya sebab istri tidak bersedia menuntut untuk melanjutkan hak nafkah istri walaupun suami akan kewajibannya:

**TABEL 4. 12**

**SEBAB MANTAN ISTRI TIDAK BERSEDIA UNTUK MELANJUTKAN  
MENUNTUT HAK ‘IDDAHNYA KETAHAPAN EKSEKUSI**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Redha dengan Suami	3	10 %
2	Mempunyai pendapatan hasil sendiri	9	30 %
3	Birokrasi di Mahkamah Syariah	18	60 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber Data: **Data olahan Angket Penelitian 2010**

Dari Tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang sebab mantan istri tidak bersedia untuk melanjutkan menuntut hak ‘iddahnya ketahapan eksekusi yaitu redha dengan suami sebanyak 3 responden atau 10 % sementara sebanyak 9 responden atau 30 % yaitu mempunyai pendapatan hasil sendiri dan sedangkan yang menyatakan sebab birokrasi di Mahkamah Syariah sebanyak 18 responden atau 60 %.

Menurut wawancara penulis dengan ibu Nor Hafifah, ketika menanyakan “kenapa puan (ibuk) tidak meminta kepada pihak Mahkamah Syariah Gerik untuk melakukan eksekusi terhadap harta mantan suami?”, beliau menjawab, “pasti nanti

rumit pengurusannya dan serta lama pulak kita menunggunya lagi”<sup>25</sup>. Maka menurut hemat penulis faktor ini menjadi pemicu bagi mantan istri tidak menuntut hak nafkah iddahnya ke tahapan eksekusi dikeranakan kurangnya sosialisasi dan rumitnya birokrasi di Mahkamah Syariah Gerik.

Di samping itu dari hasil pengamatan penulis di Mahkamah Rendah Syariah mengenai kurangnya sosioisasi pihak Mahkamah terkait proses pengeksekusi masalah nafkah iddah mantan istri. Di mana, sebelum tahun 2009, seorang mantan istri ingin melakukan eksekusi atas nafkah ‘iddah yang harus diterima untuk sementara, mantan melaporkan dan setuju untuk dilanjutkan ke tahapan eksekusi, dalam hal ini Mahkamah Rendah Syariah Gerik, terlebih dahulu meminta izin kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk melakukan eksekusi. Ketika Mahkamah Tinggi Syariah mempersetujui permohonan izin tersebut, maka Mahkamah Rendah Syariah dapat menggunakan eksekusinya terhadap suami tersebut. Sedangkan sekarang Mahkamah Rendah Syariah bisa melakukan eksekusi sendiri tanpa harus meminta rekomendasi lagi ke Mahkamah Tinggi Syariah. Hal ini bisa dilihat dari pendapat responden sanksi yang patut dikenakan terhadap suami pada tabel berikutnya:

---

<sup>25</sup> Nor Hafifah Binti Abdul Rahman, *Wawancara*, Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak, tanggal 23 Disember 2010

**TABEL 4. 13**

**JAWABAN RESPONDAN TENTANG SANKSI YANG PATUT DIKENAKAN  
MAHKAMAH SYARIAH TERHADAP SUAMI**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Menjual Harta	6	20 %
2	Mengenakan Denda	22	73,33 %
3	Penjara	2	6,67 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber Data: **Data olahan Angket Penelitian 2010**

Dari Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang sanksi yang dikenakan Mahkamah Syariah terhadap suami yaitu menjual harta sebanyak 6 responden atau 20 % manakala mengenakan denda yaitu sebanyak 22 responden atau 73,33 % dan sedangkan 2 responden atau 6,67 % menyatakan penjara.

Menurut wawancara penulis dengan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak yaitu Azman Bin Saad<sup>26</sup> tentang sanksi yang dikenakan oleh Mahkamah Syariah terhadap terhadap suami yang ingkar dalam menunaikan tanggungjawabnya adalah beliau mengatakan ketika istri melaporkan perilaku suaminya kepada Mahkamah setelah putusan di jatuhkan, maka mahkamah berinisitif untuk menasihati dan mengingatkan mantan suami agar melaksanakan hasil putusan tersebut dengan cara mengirim surat kepada suami. Setelah surat diterima suami,

---

<sup>26</sup> Azman Bin Saad (Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik), *Wawancara*, Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak, Tgl 23 Disember 2010



ternyata suami belum melaksanakan putusan mahkamah, selanjutnya istri boleh melaporkan kembali kepada Mahkamah Syariah. Sekiranya Mahkamah mendapati perintah tersebut gagal dilaksanakan, pihak yang tidak mendapat perintah bisa meminta satu perintah penguatkuasaan yang bisa dilakukan terhadap mantan suami dengan beberapa cara<sup>27</sup>. Kaedah penguatkuasaan sebagaimana yang nyatakan tidak semestinya mengikut turutan, malah boleh menjadi alternatif maupun berasingan. Pihak yang memohon bisa terus membuat perintah pengkomitan jika dia mengetahui bahawa madin penghakiman mempunyai kemampuan untuk membayar jumlah yang diperintahkan.

Daripada putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak pada tahun 2009 bagi suami yang enggan melaksanakan putusan Mahkamah dalam pemberian nafkah 'iddah terhadap istri yaitu sebanyak 30 kasus yang bermasalah di Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak, dari hal yang perkara yang bermasalah tersebut,

---

<sup>27</sup> Cara Penguatkuasaan terhadap mantan suami yaitu :

- (a) Bayaran secara langsung berserta dengan deposit.
- (b) Melalui potongan gaji (attachment) jika pihak yang mendapat perintah tersebut mempunyai majikan yang perintah bisa diserahkan kepada majikan.
- (c) Jika madin penghakiman tidak mempunyai majikan atau harta untuk dijual, alternatif yang lain ialah pihak yang mendapat perintah boleh meminta perintah pengkomitan. Melalui perintah ini, madin penghakiman diberi notis yang menyatakan sebab mengapa gagal untuk melaksanakan perintah yang dibuat ke atasnya. Pada peringkat ini, tiada perbicaraan dijalankan dan Mahkamah boleh memerintahkan madin penghakiman membayar secara ansuran atau boleh juga menangguhkan pembayaran pada suatu masa tertentu. Dalam keadaan tertentu, Mahkamah juga boleh mengubah perintah yang asal daripada sudut jumlah bayaran melihat kepada kemampuan pihak madin penghakiman jika perubahan perintah itu berasas.
- (d) Mahkamah juga boleh memerintahkan madin penghakiman dipenjarakan jika dia gagal memberikan sebab-sebab yang munasabah atau sengaja enggan membayar jumlah tersebut.

Mahkamah Syariah telah pun mengambil tindakan bagi pelaku yang ingkar dengan menyita atau merampas harta suami dan ada juga yang dikenakan denda atas pelanggaran putusan tersebut atas kelalaian pelaku serta terdapat seorang suami dari yang maklumat yang diketahui peneliti yang dikenakan sanksi penjara atas dasar menghina Mahkamah dari putusan yang dinyatakan sebelumnya dan terdapat juga 6 orang suami yang lain dikenakan sanksi berupa penyitaan atau penjualan hartanya.

### **C. Analisis Hukum Islam**

Berkaitan dengan kasus perceraian dalam menuntut hak nafkah iddah mantan istri kepada mantan suami yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, dan permasalahan tersebut dianalisa sesuai analisis hukum Islam. Adapun fakta permasalahan yang dianalisis sesuai hukum Islam yaitu aplikasi pemberian nafkah 'iddah mantan istri di Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak dan sanksi bagi yang tidak menunaikan kewajiban adalah seperti berikut:

#### **1. Aplikasi Putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak Tentang Nafkah 'Iddah Istri yang telah ditinggal suami.**

Dalam Aplikasi Putusan Pemberian nafkah 'iddah istri yang telah ditinggal suaminya, sejalan dengan apa yang diinginkan perspektif hukum Islam. Karena menurut hemat penelitian dalam penetapan tersebut Hakim di Mahkamah Rendah Syariah Gerik, sudah mempertimbangkan dengan adil dalam penetapan besarnya iddah yang wajib dibayar bekas suami.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan beberapa putusan dan wawancara peneliti lakukan di Mahkamah Syariaah bersifat relative dalam menetapkan putusan nafkah iddah istri, yang wajib dibayar suami. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam 3 (tiga) bentuk salinan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik yang telah dipaparkan di atas, yaitu:

- a. “Salinan Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik : (KES MAL NO 02100-052-0284 THN 2009) yang menetapkan dan mengadili besarnya nafkah ‘iddah Edayu Binti Osman (termohon) yang harus dibayar Muhammad Helmi Bin Abd. Razak (pemohon) sebesar RM 2 000 (Rp. 5.000.000,00,-). Sebelum diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syariah Gerik, Edayu Binti Osman (termohon) menuntut nafkah ‘iddah selama masa ‘iddah sebesar RM 2 400 (Rp. 6.000.000,00,-) Sementara Muhammad Helmi Bin Abd. Razak (pemohon) menyanggupi membayar nafkah ‘iddah kepada Edayu Binti Osman (termohon) sebesar RM 1 600 (Rp 4.000.000,00,-)”<sup>28</sup>.
- b. “Salinan Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik : (KES MAL NO 02100-092-0284 THN 2009) yang menetapkan dan mengadili besarnya nafkah ‘iddah Hasimah Binti Roslan (termohon) yang harus dibayar Razali Bin Abu Bakar (pemohon) sebesar RM 1 500 (Rp. 3.750.000,00,-). Sebelum diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syariah Gerik, Hasimah Binti Roslan (termohon) menuntut nafkah ‘iddah selama masa ‘iddah sebesar RM 2 000 (Rp. 5.000.000,00,-) Akan tetapi pihak pemohon (Razali Bin Abu Bakar) menyanggupi membayar nafkah ‘iddah kepada termohon sebesar RM 1 500 (Rp. 3.750.000,00,-)”<sup>29</sup>.
- c. “Salinan Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik : (KES MAL NO 02100-250-0284 THN 2009) yang menetapkan dan mengadili besarnya nafkah ‘iddah Siti Suraya Binti Shamsuddin (termohon) yang harus dibayar Khairul Anuar Bin Hassan (pemohon) sebesar RM 1 200 (Rp. 3.000.000,00,-). Sebelum diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syariah Gerik, Siti Suraya Binti Shamsuddin (termohon) menuntut nafkah ‘iddah selama masa ‘iddah sebesar RM 1 500 (Rp. 3.750.000,00,-) Sementara Khairul Anuar Bin Hassan

---

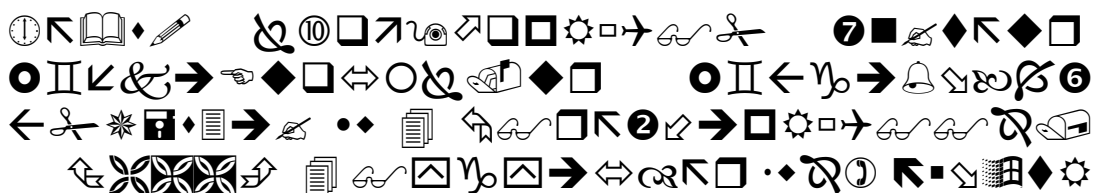
<sup>28</sup> Salinan Putusan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak, KES MAL 02100-052-0284 THN 2009, 28 Maret 2009.

<sup>29</sup> Salinan Putusan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak, KES MAL 02100-092-0284 THN 2009, 16 April 2009.

(pemohon) menyanggupi membayar nafkah 'iddah kepada Siti Suraya Binti Shamsuddin (termohon) sebesar RM 1 200 (Rp 3.000.000,00,-)"<sup>30</sup>.

Tiga bentuk Salinan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik di atas, merupakan dasar penelitian dalam menyimpulkan bahwa Aplikasi Putusan pemberian nafkah 'iddah mantan istri oleh mantan suami, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam di antaranya mengedepankan azas keadilan dan menghindari tindakan penganiayaan (penzaliman). Dimana jika dilihat dari berbagai Salinan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik tersebut, seyogyanya bersifat fruktatif dan relative.

Oleh karena itu, Hakim di Mahkamah Rendah Syariah Gerik telah menempatkan sesuatu sesuai pada porsinya. Menetapkan hak 'iddah yang wajib dibayar mantan suami sesuai kesanggupan dan kemampuannya, dan tanpa mengabaikan hak yang harus diterima mantan istri yang telah diceraikan mantan suami tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Azza Wajalla yang disinyalir dalam al-Qur'an yang berbunyi:



Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melaiankan menurut kadar kesanggupannya”<sup>31</sup>. (QS. Al-Baqarah [2] ; 233)

<sup>30</sup> Salinan Putusan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak, KES MAL 02100-250-0284 THN 2009, 25 Juni 2009.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *al-Quranul Karim*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 37.

Ayat di atas, sejatinya menjelaskan tentang kewajiban seorang ibu dalam menyusukan anaknya, Akan tetapi, ayat di atas dapat di jadikan dalil dalam menetapkan besarnya nafkah iddah yang wajib dibayar mantan suami sesuai kema'rufan (kepatutan). Dimana tidak memeratkan mantan suami<sup>32</sup>”. Hal ini berdasarkan pada kaidah syara’.

### العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya : “Ibrah diambil dari keumuman lafadz, tidak pada kekhususan sebab”<sup>33</sup>.

Kaidah diatas, menjelaskan bahwa yang menjadikan standar dari dalil tersebut adalah keumuman lafadz, kepada kekhususan sebab. Oleh karena itu, firman Allah Swt dalam surat 2 ayat 233, dapat dijadikan dalil dalam menetapkan nafkah iddah mantan istri yang ditinggalkan mantan suami.

Sejatinya, dari Firman Allah Azza Wajalla di atas, tidak menjelaskan berapa besar nafkah iddah istri yang wajib dikeluarkan mantan suami, akan tetapi besarnya nafkah tersebut dikeluarkan kemakrufan (hal yang patut), tentunya dengan pertimbangan yang penuh signifikan. Dan terdapat mantan suami yang tidak bisa melaksanakan pembayaran nafkah iddah mantan istrinya maka tidak ada paksaannya untuk membayar dalam masa iddah (faktor ekonomi) akan tetapi ia boleh membayarnya kapan ia mampu untuk membayar berdasarkan dua kesepakatan meskipun waktu masa iddah mantan istri telah selesai. Sedangkan bagi mantan

---

<sup>32</sup> Saleh Mahmoed, *Terjemahan Tafsir al-Thibyan fi ulumil Qur'an*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), cet. Ke-1 h.27.

<sup>33</sup> Abd. Latif Muda, *Penghantar Usul Fiqh*, (Kuala Lumpur 1997) Cet: 1Ket 1, h. 201

suami yang dengan sengaja melalaikan, menunda atau tidak mau atau tidak berkeinginan untuk membayar nafkah iddah mantan istri maka haramlah atas perbuatannya tersebut, berdasarkan firman Allah Swt dalam surat 2 ayat 233 dan kaedah syara' yang berlaku.

Disamping itu, sudah dijelaskan peneliti mengenai angket diteliti mengenai Aplikasi putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak dan jika dilihatkan lanjut 3 (tiga) Salinan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak di atas, peneliti memberanikan diri mengklasifikasikan bentuk putusan yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Syariah Gerik. Adapun Klasifikasi Salinan Putusan di atas, dibahagi sebagai berikut:

- a. Putusan yang berpihak kepada Pemohon (mantan suami). Hal ini terlihat pada Salinan Putusan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak, KES MAL 02100-092-0284 THN 2009, 28 Maret 2009.
- b. Putusan yang berpihak kepada temohon (mantan suami). Hal ini terlihat pada Salinan Putusan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak, KES MAL 02100-250-0284 THN 2009, 28 Maret 2009.
- c. Putusan Mahkamah Rendah syariah gerik yang bersifat komporomi. Hal ini terlihat pada Salinan Putusan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak, KES MAL 02100-052-0284 THN 2009, 28 Maret 2009.

Namun, dari berbagai jawaban angket diatas serta putusan yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Syariah gerik di atas, bertujuan mencari keadilan. Dimana menetapkan sesuatu sesuai pada porsinya dan hak mantan istri dipenuhi, tanpa memberatkan mantan suami, begitu sebaliknya. Hal ini didasari dari Firman Allah

SwT yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, sebagaimana Firmannya:

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَ الْيَتَامَىٰ حَقَّهُ يُغْوِيهِمْ سُلُوكَ ظُلُمٍ ۖ لَئِنْ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَنُكَفِّرَنَّهُمْ وَلَنُصْغِرَنَّ لَهُمْ فِي عَذَابٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُكْفِرُ هَكَذَا ۖ إِنَّهُ مُبْهِمٌ ۝٥٨  
 .... ﴿٥٨﴾ وَتُؤْتُونَ مَالَ الْيَتَامَىٰ حَقَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ ظُلُمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُبْهِمٌ ۝٥٨  
 ﴿٥٨﴾ وَتُؤْتُونَ مَالَ الْيَتَامَىٰ حَقَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ ظُلُمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُبْهِمٌ ۝٥٨

Artinya: “Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (QS. An-Nisa’ (4): 58)<sup>34</sup>.

Firman Allah Swt lagi:

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُ مَالًا فَتُعْثِرُوا بِهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝٤٢  
 وَلَا تَقْبَلُوا لَهُ مَالًا فَتُعْثِرُوا بِهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝٤٢  
 وَلَا تَقْبَلُوا لَهُ مَالًا فَتُعْثِرُوا بِهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝٤٢  
 وَلَا تَقْبَلُوا لَهُ مَالًا فَتُعْثِرُوا بِهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝٤٢

Artinya: “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil” (QS: Al-Ma’idah (5): 42)<sup>35</sup>.

## 2. Sanksi bagi yang tidak menunaikan kewajiban pembayaran nafkah ‘iddah.

Berdasarkan fakta angket di lapangan dalam pelaksanaan Salinan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak, ditemui beberapa kendala, yaitu kendala yang dilatarbelakangi faktor kelalaian mantan suami dan faktor ekonomi. Sejatinya, Mahkamah harus bersikap tegas dalam menerapkan hukum, apalagi hukum yang berkaitan dengan maslahat umat, yang apa akhirnya akan mengabaikan hak-hak umat jika tidak ditegakkan, diantaranya masalah hak ‘iddah mantan istri yang ditinggalkan mantan suaminya.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal 200.

Dalam hal ini, Mahkamah atau Pengadilan (*Qadhi*) harus mengembalikan hak mantan istri dari mantan suami, dengan cara mewajibkan kepada mantan suami untuk membayar hak 'iddah mantan istri yang diceraikannya. Hal ini telah disepakati atas petaklifan (pembebasan kewajiban) orang yang merdeka, yang berada di tempat (hadir), mempunyai kemampuan terhadap harta, baligh, berakal, tidak di-*mahjur* (*mahjur 'alaih*), untuk memberi nafkah kepada istrinya yang dikahwininya secara sah, jika ia telah men-*dhukhul*-nya dan istrinya termasuk wanita yang dapat disengamami serta tidak nuyuz, baik sang istri punya harta atau tidak. Dan telah terjadi *ijma'* wajibnya memberi nafkah kepada istri atau mantan istrinya<sup>36</sup>. Penetapan kewajiban pemberian nafkah ini turut berlaku sebagaimana menurut seksyen (Pasal) 60 Enakmen Keluarga Islam Perak Tahun 1984 (pindaan 2004), yaitu kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi istri, dan kesan *nusyuz*<sup>37</sup>. Jadi menurut ketetapan *ijma'* dan ketentuan seksyen (Pasal) 60 Enakmen Keluarga Islam Perak diatas maka jelas bahwa jika terjadi suatu perceraian maka bekas suami masih mempunyai tanggung jawab yang harus diembankan kepadanya yaitu

---

<sup>36</sup> Sa'di Abu Habieb, *Mausuu'atul ijmak*, Penerjemah K.H.M. Ahmad Sahal Machfudz dan K.H.A. Mustofa Bisri, *Ensiklopedi Ijmak*, (Jakarta: Pustaka Firdaus: 2006) Cet IV, hal 519.

<sup>37</sup> Perak, *Enakmen Keluarga Islam*, (Perak, 2004), halaman 441-442.

Peruntukan seksyen 60 menyebutkan sebagai berikut:

1. Tertakluk kepada Hukum Syarak, Mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada istri atau bekas isterinya.
2. Tertakluk kepada Hukum Syarak dan pengesahan Mahkmah, seseorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia *nusyuz* atau enggan dengan tidak berpautan menurut kemahuan atau perintah sah dari suaminya:
  - (a) apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya
  - (b) apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya; atau
  - (c) apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke suatu rumah atau tempat lain,
3. Selepas sahaja isteri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah suaminya, maka isteri itu tidak lagi menjadi *nusyuz*.



memberi biaya penghidupan (nafkah iddah) kepada bekas istrinya selama masih dalam masa iddah (masa menunggu), melainkan ia *nusyuz*. Nafkah iddah wajib diberikan kepada perempuan yang sedang beriddah raj'i dan beriddah hamil. Perempuan yang beriddah raj'i berhak mendapat nafkah berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam Al-quran:

𐀀 𐀁 𐀂 𐀃 𐀄 𐀅 𐀆 𐀇 𐀈 𐀉 𐀊 𐀋 𐀌 𐀍 𐀎 𐀏 𐀐 𐀑 𐀒 𐀓 𐀔 𐀕 𐀖 𐀗 𐀘 𐀙 𐀚 𐀛 𐀜 𐀝 𐀞 𐀟 𐀠 𐀡 𐀢 𐀣 𐀤 𐀥 𐀦 𐀧 𐀨 𐀩 𐀪 𐀫 𐀬 𐀭 𐀮 𐀯 𐀰 𐀱 𐀲 𐀳 𐀴 𐀵 𐀶 𐀷 𐀸 𐀹 𐀺 𐀻 𐀼 𐀽 𐀾 𐀿 𐁀 𐁁 𐁂 𐁃 𐁄 𐁅 𐁆 𐁇 𐁈 𐁉 𐁊 𐁋 𐁌 𐁍 𐁎 𐁏 𐁐 𐁑 𐁒 𐁓 𐁔 𐁕 𐁖 𐁗 𐁘 𐁙 𐁚 𐁛 𐁜 𐁝 𐁞 𐁟 𐁠 𐁡 𐁢 𐁣 𐁤 𐁥 𐁦 𐁧 𐁨 𐁩 𐁪 𐁫 𐁬 𐁭 𐁮 𐁯 𐁰 𐁱 𐁲 𐁳 𐁴 𐁵 𐁶 𐁷 𐁸 𐁹 𐁺 𐁻 𐁼 𐁽 𐁾 𐁿 𐂀 𐂁 𐂂 𐂃 𐂄 𐂅 𐂆 𐂇 𐂈 𐂉 𐂊 𐂋 𐂌 𐂍 𐂎 𐂏 𐂐 𐂑 𐂒 𐂓 𐂔 𐂕 𐂖 𐂗 𐂘 𐂙 𐂚 𐂛 𐂜 𐂝 𐂞 𐂟 𐂠 𐂡 𐂢 𐂣 𐂤 𐂥 𐂦 𐂧 𐂨 𐂩 𐂪 𐂫 𐂬 𐂭 𐂮 𐂯 𐂰 𐂱 𐂲 𐂳 𐂴 𐂵 𐂶 𐂷 𐂸 𐂹 𐂺 𐂻 𐂼 𐂽 𐂾 𐂿 𐃀 𐃁 𐃂 𐃃 𐃄 𐃅 𐃆 𐃇 𐃈 𐃉 𐃊 𐃋 𐃌 𐃍 𐃎 𐃏 𐃐 𐃑 𐃒 𐃓 𐃔 𐃕 𐃖 𐃗 𐃘 𐃙 𐃚 𐃛 𐃜 𐃝 𐃞 𐃟 𐃠 𐃡 𐃢 𐃣 𐃤 𐃥 𐃦 𐃧 𐃨 𐃩 𐃪 𐃫 𐃬 𐃭 𐃮 𐃯 𐃰 𐃱 𐃲 𐃳 𐃴 𐃵 𐃶 𐃷 𐃸 𐃹 𐃺 𐃻 𐃼 𐃽 𐃾 𐃿 𐄀 𐄁 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 𐄌 𐄍 𐄎 𐄏 𐄐 𐄑 𐄒 𐄓 𐄔 𐄕 𐄖 𐄗 𐄘 𐄙 𐄚 𐄛 𐄜 𐄝 𐄞 𐄟 𐄠 𐄡 𐄢 𐄣 𐄤 𐄥 𐄦 𐄧 𐄨 𐄩 𐄪 𐄫 𐄬 𐄭 𐄮 𐄯 𐄰 𐄱 𐄲 𐄳 𐄴 𐄵 𐄶 𐄷 𐄸 𐄹 𐄺 𐄻 𐄼 𐄽 𐄾 𐄿 𐅀 𐅁 𐅂 𐅃 𐅄 𐅅 𐅆 𐅇 𐅈 𐅉 𐅊 𐅋 𐅌 𐅍 𐅎 𐅏 𐅐 𐅑 𐅒 𐅓 𐅔 𐅕 𐅖 𐅗 𐅘 𐅙 𐅚 𐅛 𐅜 𐅝 𐅞 𐅟 𐅠 𐅡 𐅢 𐅣 𐅤 𐅥 𐅦 𐅧 𐅨 𐅩 𐅪 𐅫 𐅬 𐅭 𐅮 𐅯 𐅰 𐅱 𐅲 𐅳 𐅴 𐅵 𐅶 𐅷 𐅸 𐅹 𐅺 𐅻 𐅼 𐅽 𐅾 𐅿 𐆀 𐆁 𐆂 𐆃 𐆄 𐆅 𐆆 𐆇 𐆈 𐆉 𐆊 𐆋 𐆌 𐆍 𐆎 𐆏 𐆐 𐆑 𐆒 𐆓 𐆔 𐆕 𐆖 𐆗 𐆘 𐆙 𐆚 𐆛 𐆜 𐆝 𐆞 𐆟 𐆠 𐆡 𐆢 𐆣 𐆤 𐆥 𐆦 𐆧 𐆨 𐆩 𐆪 𐆫 𐆬 𐆭 𐆮 𐆯 𐆰 𐆱 𐆲 𐆳 𐆴 𐆵 𐆶 𐆷 𐆸 𐆹 𐆺 𐆻 𐆼 𐆽 𐆾 𐆿 𐇀 𐇁 𐇂 𐇃 𐇄 𐇅 𐇆 𐇇 𐇈 𐇉 𐇊 𐇋 𐇌 𐇍 𐇎 𐇏 𐇐 𐇑 𐇒 𐇓 𐇔 𐇕 𐇖 𐇗 𐇘 𐇙 𐇚 𐇛 𐇜 𐇝 𐇞 𐇟 𐇠 𐇡 𐇢 𐇣 𐇤 𐇥 𐇦 𐇧 𐇨 𐇩 𐇪 𐇫 𐇬 𐇭 𐇮 𐇯 𐇰 𐇱 𐇲 𐇳 𐇴 𐇵 𐇶 𐇷 𐇸 𐇹 𐇺 𐇻 𐇼 𐇽 𐇾 𐇿 𐈀 𐈁 𐈂 𐈃 𐈄 𐈅 𐈆 𐈇 𐈈 𐈉 𐈊 𐈋 𐈌 𐈍 𐈎 𐈏 𐈐 𐈑 𐈒 𐈓 𐈔 𐈕 𐈖 𐈗 𐈘 𐈙 𐈚 𐈛 𐈜 𐈝 𐈞 𐈟 𐈠 𐈡 𐈢 𐈣 𐈤 𐈥 𐈦 𐈧 𐈨 𐈩 𐈪 𐈫 𐈬 𐈭 𐈮 𐈯 𐈰 𐈱 𐈲 𐈳 𐈴 𐈵 𐈶 𐈷 𐈸 𐈹 𐈺 𐈻 𐈼 𐈽 𐈾 𐈿 𐉀 𐉁 𐉂 𐉃 𐉄 𐉅 𐉆 𐉇 𐉈 𐉉 𐉊 𐉋 𐉌 𐉍 𐉎 𐉏 𐉐 𐉑 𐉒 𐉓 𐉔 𐉕 𐉖 𐉗 𐉘 𐉙 𐉚 𐉛 𐉜 𐉝 𐉞 𐉟 𐉠 𐉡 𐉢 𐉣 𐉤 𐉥 𐉦 𐉧 𐉨 𐉩 𐉪 𐉫 𐉬 𐉭 𐉮 𐉯 𐉰 𐉱 𐉲 𐉳 𐉴 𐉵 𐉶 𐉷 𐉸 𐉹 𐉺 𐉻 𐉼 𐉽 𐉾 𐉿 𐊀 𐊁 𐊂 𐊃 𐊄 𐊅 𐊆 𐊇 𐊈 𐊉 𐊊 𐊋 𐊌 𐊍 𐊎 𐊏 𐊐 𐊑 𐊒 𐊓 𐊔 𐊕 𐊖 𐊗 𐊘 𐊙 𐊚 𐊛 𐊜 𐊝 𐊞 𐊟 𐊠 𐊡 𐊢 𐊣 𐊤 𐊥 𐊦 𐊧 𐊨 𐊩 𐊪 𐊫 𐊬 𐊭 𐊮 𐊯 𐊰 𐊱 𐊲 𐊳 𐊴 𐊵 𐊶 𐊷 𐊸 𐊹 𐊺 𐊻 𐊼 𐊽 𐊾 𐊿 𐋀 𐋁 𐋂 𐋃 𐋄 𐋅 𐋆 𐋇 𐋈 𐋉 𐋊 𐋋 𐋌 𐋍 𐋎 𐋏 𐋐 𐋑 𐋒 𐋓 𐋔 𐋕 𐋖 𐋗 𐋘 𐋙 𐋚 𐋛 𐋜 𐋝 𐋞 𐋟 𐋠 𐋡 𐋢 𐋣 𐋤 𐋥 𐋦 𐋧 𐋨 𐋩 𐋪 𐋫 𐋬 𐋭 𐋮 𐋯 𐋰 𐋱 𐋲 𐋳 𐋴 𐋵 𐋶 𐋷 𐋸 𐋹 𐋺 𐋻 𐋼 𐋽 𐋾 𐋿 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙 𐌚 𐌛 𐌜 𐌝 𐌞 𐌟 𐌠 𐌡 𐌢 𐌣 𐌤 𐌥 𐌦 𐌧 𐌨 𐌩 𐌪 𐌫 𐌬 𐌭 𐌮 𐌯 𐌰 𐌱

Artinya: “Tempatkan lah (para istri) dimana kamu bertempat menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka; dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, tetapi jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”<sup>38</sup>. (TQS. Ath-Thalaaq[65] : 6)

Jika mantan suami berkeberatan dalam menerapkan aturan dengan tidak membayar hak-hak 'iddah mantan istrinya, akan tetapi terlebih dahulu memperhatikan sebab mantan suami tidak membayar nafkah 'iddah mantan istrinya. Sebagaimana dijelaskan diatas sebelumnya mengenai kendala-kendala suami yang tidak melaksanakan faktor kelalaian, di mana mantan suami sengaja tidak membayar

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, hal 558

nafkah 'iddah tersebut. Jika ditemukan tidak terpenuhinya hak 'iddah seorang mantan istri dikarenakan faktor kelalaian, dimana mantan suami sengaja untuk tidak membayar hak 'iddah tersebut, maka Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak khususnya, dapat menuntut dan menasihati mantan suami agar membayarkan nafkah 'iddah tersebut. Jika setelah dinasehati, mantan suami tetap berpegang pada prinsipnya untuk tidak membayar, maka Mahkamah harus mengambil tindakan tegas agar suami melaksanakan kewajibannya dan mengenakan sanksi bagi suami yang ingkar dalam menjalankan kewajiban seperti mengenakan denda, menjual harta, dan mengenakan kurungan penjara bagi pesalah berat. Hal ini sejatinya, yang harus dilakukakn dalam rangka melaksanakan sistem keadilan Islam yang adil dan cekap berlandaskan Hukum Syarak dan undang-undang Negara yang digubal dengan motto Mahkamah Syariah itu sendiri "*Syariah Asas Keadilan*".

Sikap demikian tentunya berbeda dengan seorang mantan suami yang tidak membayar nafkah 'iddah mantan istri, yang dipicu dari faktor ekonomi karena tidak memiliki uang. Yang sebelumnya mantan suami menyanggupi besarnya nafkah 'iddah mantan istri saat di depan hakim di Mahkamah. Dalam hal ini, pengadilan memberikan tenggang waktu kepada mantan suami untuk membayar 'iddah mantan istri, sehingga mantan suami memiliki kesanggupan dalam membayar hak 'iddah mantan istrinya. Akan tetapi, setelah tenggang waktu yang diberikan, ternyata mantan suami memiliki kesanggupan dalam membayar hak 'iddah tersebut,

menurut hemat peneliti, hal ini menjadi kewajiban Negara dan mengambil alih pemenuhan hak tersebut.

Berdasarkan fakta di lapangan yang peneliti jumpai, hal ini berbeda dengan kondisi Mahkamah saat dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat, khususnya perkara menyangkut hak 'iddah tersebut. Dimana Mahkamah Rendah Syariah bersikap pasif dalam hal menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan mahkamah beranggapan bahwa permasalahan 'iddah tersebut dianggap tidak mengalami dilema, ketika mantan istri tidak melaporkan kembali ke Mahkamah Syariah setelah diputuskan Mahkamah saat dalam persidangan<sup>39</sup>.

Hal ini berbeda dengan Pengadilan (Mahkamah) dalam Islam, sebagaimana dijelaskan diatas. Mahkamah bersikap tegas tanpa pandang bulu dalam menerapkan aturan Syara'. Seyogyanya, dalam Islam ditemukan beberapa bentuk Mahkamah (Qadhi) yang bertindak tegas dalam menerapkan aturan Syara' yang bersumberkan dari al-Qur'an dan Hadith Rasulullah Saw, yaitu :

#### a. *Qadhi*

Qadhi biasa bertugas mengurus penyelesaian perkara sengketa di tengah masyarakat dala hal mu'amalah (transaksi yang dilakuakn antara satu orang dengan

---

<sup>39</sup> Karena hukum itu ada yang termasuk lapangan Pidana, dan ada yang Perdata (*private*). Hukum dalam lingkup pidana, di mana Mahkamah dalam suatu Negara bersifat pro aktif menyelesaikannya dan dengan ancaman menjual harta suami, mengenakan denda (saman), dan kurungan (penjara), sehingga pihak yang bersangkutan takut dan gementar dengan apa yang akan dilakukannya jika tidak sesuai dengan putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah. Hal ini berbeda dengan hukum dalam ruang lingkup Perdata, dimana Mahkamah Syariah bersikap pasif dan menunggu laporan. Jika tidak ada laporan dari pihak bersangkutan, maka Mahkamah beranggapan masalah yang sedang menimpa bersangkutan tidak menjadi suatu masalah dan tentunya tidak ditindak lanjutkan oleh Mahkamah, termasuk permasalahan berhubungan dengan hak nafkah istri yang diceraikan suaminya.

orang yang lainnya) dan *uqubat* (sanksi hukum), misalnya perkara dalam ruang lingkup keluarga.

b. *Qadhi Hisbah*

Qadhi Hisbah yaitu qadhi yang mengurus penyelesaian perkara penyimpangan yang bisa membahayakan hak jama'ah, misalnya pengurangan berat timbangan dalam jual beli di Pasar.

c. *Qadhi Mazholim*

Qadhi Mazholim adalah qadhi yang mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan Negara, misalnya kasus korupsi<sup>40</sup>.

Dari ketiga bentuk Mahkamah di atas, permasalahan dalam lingkup keluarga khususnya tentang hak 'iddah istri yang diceraikan suaminya, diadili oleh Qadhi. Teknisnya, bisa dengan melalui laporan disamping pihak Mahkamah melalui pengamatan langsung di lapangan. Oleh karena itu, dari sisi sanksi yang dikenakan terhadap mantan suami yang tidak melaksanakan nafkah 'iddah atas menghina putusan Mahkamah Mahkamah Rendah Syariah bertetapan dengan konsep Islam tetapi pelaksanaan Mahkamah dalam melakukan sanksi terhadap mantan suami kurang berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sebagaimana penelitian penulis sebelumnya. Justru itu juga, sanksi yang ditetapkan Mahkamah,

---

<sup>40</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Al-Izzah, 2002), hal. 229.

dapat dipandang *al-Siyasah al-Syar'iyah* yaitu pengaturan yang dilakukan pemerintah (Mahkamah Rendah Syariah Gerik) untuk merealisasikan asas *jalbu al-mashalihi wa daf'u al-mafasidi* (Mengambil kemaslahatan dan menolak mudarat).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Aplikasi putusan pembayaran nafkah 'iddah mantan suami terhadap mantan istri yang putus perkahwinan (cerai) di Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung, dimana mantan suami bisa membayar di Mahkamah Syariah setelah diputuskan besarnya 'iddah yang ditetapkan Hakim dan secara tidak langsung dengan meminta persetujuan dispensasi waktu dalam membayar nafkah 'iddah tersebut. Dispensasi di beri kepada mantan suami dalam dua waktu yaitu selama masa 'iddh dan setelah masa 'iddah. Namun tetap saja mantan suami tidak melaksanakan sebanyak seramai 14 orang sebagaimana mestinya karena kendala-kendala dari kesengajaan (6 orang suami) dan tidak kemampuan ekonomi (8orang).
2. Sanksi yang diberikan Mahkamah adalah berupa mengenakan denda, menjual harta dan mengenakan waran kurungan penjara bagi suami yang tidak menunaikan kewajiban semestinya, sebagaimana tercatat di Mahkamah terdapat seorang pelaku dari suami dikenakan kurungan penjara atas dasar menghina Mahkamah dan baki yang selebihnya dikenakan denda dan penjualan hartanya atas dasar kesengajaan yang jelas. Hal demikian wajar dalam menjalankan hukum bagi yang ingkar atas putusan Mahkamah Syariah.

3. Aplikasi dan sanksi yang dilakukan Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak mengenai pemberian nafkah 'iddah oleh mantan suami kepada mantan istri adalah bertetapan dengan Perspektif Hukum Syara' dalam mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang berlaku, akibat kendala-kendala yang dihadapi dari mantan suami menyebabkan proses berpindah kepada tahapan yang lain dalam mengadilinya. Dan sanksi yang tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana semestinya adalah bersesuaian dengan tuntutan hukum Islam serta harus berperanan lebih pro aktif menegakkan keadilan hukum dan menghindarkan kezaliman.

#### **B. Saran-saran**

Adapun sara-saran yang penuls kemukakn disini adalah sebagai berikut:

1. Kepada mantan suami hendaklah mengembalikan dan membayar serta memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan Syara', diantaranya memenuhi hak 'iddah mantan istri yang telah diceraikannya. Karena Syara' tidak menetapkan berapa besarnya hak 'iddah yang harus dikeluarkan, oleh karena itu mantan suami hendaknya membayar hak 'iddah setelah diputuskan hakim di Mahkamah Syariah khususnya Gerik Perak.
2. Bagi pihak Mahkamah Syariah, khususnya Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak agar mengembaliklan fungsi Mahkamah Syariah sesuai dengan fitrah (Islam) bertindak tegas dalam mengadili setiap kasus yang ada di tengah masyarakat. Berbagai pihak, terpentingnya pihak Mahkamah Rendah Syariah

Gerik Perak harus bersikap Pro aktif tanpa menunggu laporan dari berbagai pihak. Dimana Mahkamah harus terjun langsung ke lapangan. Tindakan sanksi sewajarnya harus di berikan kepada mantan suami yang ingkar dalam melaksanakan putusan nafkah 'iddah terhadap mantan istri.

3. Hukum Islam yang sedia ada haruslah di implimentasikan sepenuhnya dalam mengadili perkara yang berkaitan hak 'iddah mantan istri, aplikasi Mahkamah Syariah harus dipatukan dengan Hukum Islam agar peranan institusi Mahkamah Syariah sejalan menurut ketetapan al-Qur'an dan al-Hadith.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Abdurra'uf, Muhammad Idris, *Al Marbawy, Kamus Idris Melayu*, Darul Fikir, Kuala Lumpur, 1990, Cet 1, juz II.

Al-Ashqalani, Ibnu Hajar, Al-Hafidh, *Bulughul Margham*, (Mekkah, 1378H).

Al-Khin, Mustofa, Al-Bugho dan Asy-Syarbaji, Ali, (2002), *Kitab Fikah Mazhab Syafie*. Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn Bhd.

Al-Sabouni, Mohammad Ali, Az-Azwaaj *Al-Islaami Al-Mukkir: Sa'aadatun wa Hashaanatun*, Penerjemah Hamdan Rasyid, *Pernikahan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Dar Al-Kutub al-Islamiah, Cetakan I, 2004).

Anonim, (2006). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi /Makalah Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum*, Riau : UIN Sultan Syarif Kasim.

Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan XIII, Agustus 2006).

Ayyub, Hassan, *Terjemahan Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006), Cetakan II.

Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Rawamangun, Jakarta Timur : Prenada Media, Cetakan I, Juli 2003).

Government Of Perak Gazette, *Warta Kerajaan Negeri Perak*, (Negeri Perak:2004).

Habieb, Sa'di Abu, *Mausuu'atul ijmak*, Penerjemah K.H.M. Ahmad Sahal Machfudz dan K.H.A. Mustofa Bisri, *Ensiklopedi Ijmak*, (Jakarta: Pustaka Firdaus: 2006) Cetakan IV.

Hamid, Farida, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya : Appolo).

Ibrahim, Ahmad. Undang-undang Kelaurga Islam di Malaysia, (Kuala Lumpur Melayan Law Journal Sdn, t.t, 1999).

Jannati, Muhammad Ibrahim, *Durus fi Fiqhil al-Muqarani*, penerbit Majma' al-Syahid al-Shadr al-'Ilmi, cetakakn I, Qum, Iran 1885M, Penerjemah Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf dan Alam firdaus, *Perbandingan Lima Mazhab*, Syafi'I, Hanbali, Maliki, Hanafi dan Ja'fari, (Jakarta Selartan : Cahaya, 2007) Cetakan I.

Mahmoed, Saleh, *Terjemahan Tafsir al-Thibyan fi ulumil Qur'an*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994).

Muda, Abd. Latif *Penghantar Usul Fiqh*, (Kuala Lumpur : 1997) Cetakan 1.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'ala al-Madzhabib al-Khamsah*, Penerjemah Masykur A.B, Afifi Muhammad, dan Idrus Al-Khaff, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakrta: Lentera, 2008), Cet. Ke XXI.

Muhtar, Kamal, *Asas Hukum Perkahwinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Cetakan II.

Muhammad 'Uwaidah, Kamil, *Terjemahan Fiqih wanita*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006), Cetakan XXII.

Perak , *Enakmen Keluarga Islam*, (Perak: Badan kehakiman perak, 2004).

\_\_\_\_\_, Jabatan Kehakiman Negeri, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Perak* (Ipoh : 1992).

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Cetakan Ke XII.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983) Cetakan. IV.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Sunnah*, penerjemah Drs. Muhammad Thalib, (Al Ma'arif, Bandung), cetakan. XX.

Salim, Rafiah, *Undang-undang Keluarga dan Kebudayaan Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998).

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Agrisinda 1994), Cetakan 1.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-4, 2000).

Rusy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet Ke II, 2002).

Teh, Awang, Ghafani, *Selepas Perceraian Apakah Hak Wanita yang Perlu Dituntut*, Jabatan kemajuan Islam Malaysia (Putrajaya : JAKIM, Cet V, 2002).

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1997)

Zahrah, Muhammad Abu, *Ahwalus Syahsiyyah*, (As-Sya'adah, 1957), Cetakan III.

Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Pemerintahn Islam*, (Jakarta: Al-Izzah, 2002).

Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. IV (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997).

\_\_\_\_\_, *al-Fiqhu As-Syafi'I al-Muyassar*, penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: al-Amirah, Cet 1, 2010), Jilid III.

## DAFTAR ISI

<b>TABEL I</b>	: Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak .....	28
<b>TABEL IV.1</b>	: Pengetahuan Repondan Tentang Nafkah ‘Iddah...	47
<b>TABEL IV.2</b>	: Kewajiban Suami Menafkahi Mantan Istri Setelah Perceraian .....	48
<b>TABEL IV.3</b>	: Pelaksanaan Pembayaran Nafkah ‘Iddah Oleh Mantan Suami .....	49
<b>TABEL IV.4</b>	: Masa Kewajiban Pembayaran Nafkah ‘Iddah.....	50
<b>TABEL IV.5</b>	: Pendapat Respodan Tentang Suami Yang Tidak Menunaikan Kewajiban Nafkah ‘iddah.....	52
<b>TABEL IV.6</b>	: Putusan Mahkamah Syariah Bersifat Mengikat Tentang Nafkah ‘Iddah.....	53
<b>TABEL IV.7</b>	: Putusan Mahkamah Syariah Sesuai Dengan Kebutuhan Mantan Istri .....	55
<b>TABEL IV.8</b>	: Kendala-kendala Mantan Suami Tidak Melaksanakan Putusan Mahkamah .....	56
<b>TABEL IV.9</b>	: Mekanisme Pembauyaran Nafkah ‘Iddah.....	57
<b>TABEL IV.10</b>	: Cara Mahkamah Syaraih Menyuruh Mantan Suami Agar Melaksanakan Kewajibannya .....	59
<b>TABEL IV.11</b>	: Pengetahuan Mantan Suami Akibat Hukum Jika Tidak Melaksanakan Kewajiban .....	60
<b>TABEL IV.12</b>	: Sebab Mantan Istri Tidak Bersedia Untuk Melanjutkan Menuntut Hak ‘Iddahnya Ketahapan Eksekusi.....	61
<b>TABEL IV.13</b>	: Jawaban Respondan Tentang Sanksi Yang Patut Dikenakan Mahkamah Syariah Terhadap Suami.....	63

## **ANGKET PENELITIAN**

JUDUL : APLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH GERIK PERAK  
TENTANG PEMBERIAN NAFKAH 'IDDAH DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM .

Nama Istri :

Umur :

Nombor KTP/Kad Pengenalan :

Jenis Kelamin : P/L

### **A. PETUNJUK PENGISIAN**

- > Angket ini digunakan untuk keperluan Ilmiah
- > Berilah tanda ( X ) pada salah satu pertanyaan atau alternative jawaban  
huruf a,b,c, atau d, yang anda anggap Benar.
- > Setelah mengisinya Angket Penelitian ini, diharap dapat dikembalikan.
- >Kejujuran Tuan/Puan/Saudara/sauadari dalam menjawab Angket ini merupakan keberhasilan kami dalam mengumpulkan data yang ada. Dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

### **B. PERTANYAAN-PERTANYAAN**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang nafkah 'iddah?
  - a. Mengetahui
  - b. Tidak Mengetahui
  - c. Kurang mengetahui
2. Apakah mantan suami masih lagi berkewajiban menafkahi mantan istri setelah perceraian?
  - a. Wajib
  - b. Tidak Wajib
  - c. Harus

3. Adakah pelaksanaan pembayaran nafkah 'iddah dapat dilaksanakan oleh mantan suami?
- a. Dapat dilaksanakan
  - b. Tidak dapat dilaksanakan
  - c. Kurang dilaksanakan
4. Sudah berapa lamakah mantan suami menunaikan kewajiban tersebut?
- a. 3 Bulan kebawah
  - b. 3 Bulan Keatas
  - c. Tidak Ada
5. Bagaimana pendapat ibu tentang suami yang tidak menunaikan kewajiban nafkah 'iddah?
- a. Setuju
  - a. Tidak setuju
  - b. Tidak tahu
6. Apakah putusan Mahkamah Syariah bersifat mengikat tentang Nafkah 'Iddah ?
- a. Mengikat
  - b. Kurang Mengikat
  - c. Tidak Mengikat
7. Adakah putusan tersebut sesuai dengan kebutuhan mantan isteri?
- a. Sesuai
  - b. Tidak Sesuai
  - c. Kurang Sesuai
8. Apa saja Kendala-kendala mantan suami tidak melaksanakan Putusan Mahkamah?
- a. Ekonomi
  - b. Kelalaian/ Kesengajaan
  - c. Beranggapan istri redha
9. Bagaimanakah mekanisme pembayaran nafkah iddah?
- a. Secara langsung
  - b. Potongan Gaji
  - c. Berhutang

10. Bagaimanakah cara Mahkamah Syariah menyuruh mantan suami agar melaksanakan kewajibannya?

- a. Menasihati
- b. Memberi surat amaran
- c. Panggil hadir ke Mahkamah

11. Adakah mantan suami mengetahui akibat hukum jika tidak melaksanakan kewajiban?

- a. Mengetahui
- b. Tidak mengetahui
- c. Kurang Mengetahui

12. Apakah sebab mantan istri tidak bersedia untuk melanjutkan menuntut hak iddahnya ketahapan eksekusi?

- a. Redha dengan suami
- b. Mempunyai pendapatan hasilan sendiri
- c. Birokrasi di Mahkamah Syariah

13. Bagaimana sanksi yang patut dikenakan oleh Mahkamah Rendah Syariah terhadap mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya?

- a. Menjual harta
- b. Mengenakan denda
- c. Penjara